

**UPAYA MEMPERTAHANKAN OPINI WTP  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
DKI JAKARTA MELALUI PENERAPAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN DAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

**SITI NURLELA**  
**NIM.4320101**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**UPAYA MEMPERTAHANKAN OPINI WTP  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
DKI JAKARTA MELALUI PENERAPAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN DAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI**

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

**SITI NURLELA**  
**NIM.4320101**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurlela

NIM 4320101

Judul Skripsi : **UPAYA MEMPERTAHANKAN OPINI WTP**

**PADA DIREKTORAT JENDERAL  
PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA MELALUI  
PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL, STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN DAN SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Mei 2025



Siti Nurlela

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri.

Siti Nurlela Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : Siti Nurlela

NIM : 4320101

Judul Skripsi : **UPAYA MEMPERTAHANKAN OPINI WTP PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA MELALUI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 18 Maret 2025

Pembimbing,



Ahmad Rosvid, S.E., M.Si.  
NIP. 19790331 2006041 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, [www.febi.uingusdur.ac.id](http://www.febi.uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Siti Nurlela**  
NIM : **4320101**  
Judul : **Upaya Mempertahankan Opini WTP pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan DKI Jakarta melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi**  
Dosen Pembimbing : **Ahmad Rosyid, S.E., M.Si., Ak.CA**

Telah diujikan pada Hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

  
**Ade Gunawan, M.M.**  
NIP. 198104252015031002

  
**Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA, CA.**  
NIP. 198706302018012001

Pekalongan, 10 Juli 2025  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
**Dr. H.A.M. Kholidz Ma'shum, M.Ag.**  
NIP. 1978061620031210003

## MOTTO

“Tidak ada ujian yang tidak bisa selesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesangupan. Karena, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

(QS. Al Baqarah : 286)

“Ketahuilah bahwa kemenangan beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan.”

(HR Tirmidzi)

“Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa.”

(Zig Ziglar)

“Pelan atau cepat, yang penting tetap melangkah. Jangan berhenti, karena usaha pasti berbuah hasil.”

(Ella)

“Pikiran itu layaknya kemudi arahnya menentukan kemana hidup kita menuju.”

(Ella)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bukti dari perjuangan, kerja keras, dan kesabaran dalam menempuh pendidikan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Setiap lembar yang tertulis di dalamnya adalah hasil dari doa, dukungan, serta dorongan dari banyak pihak yang tidak hentinya – hentinya memberikan semangat. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak M. Rahmat dan Ibu Waidah yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanannya selalu menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Terimakasih atas segala dukungan, baik dalam bentuk moril maupun materiil, serta doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilan penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama Ma, Pa, temani penulis di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis kedepannya.
2. Kepada keluarga dan saudara-saudara saya, teruntuk kaka penulis Sri Intan. Terimakasih atas segala dukungannya, bimbingan serta nasihat yang diberikan. Terimakasih telah percaya pada penulis. Terimakasih juga untuk adik penulis Dwi Oktapiani yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Ahmad Rosyid, S.E., M.Si., Ak.CA yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis

dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dosen Wali Bapak Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Staff Akademik, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan penulisan skripsi ini, serta memberikan dukungan, arahan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat saya, terkhusus Siti Zulkaidah dan Siti Nur Kholifah yang selalu mendukung dan menemani penulis dari awal masa perkuliahan. Dan teman-teman Aliansi Mahasiswa Jabodetabek yang menjadi rumah kedua bagi penulis di perantauan ini. Terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah serta penyemangat di kala sulit.
8. Kepada teman-teman seangkatan program studi akuntansi syariah yang telah membantu penulis semasa perkuliahan
9. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Siti Nurlela. Terimakasih sudah selalu berusaha sebaik mungkin. Terimakasih sudah bertahan dan tetap memilih melangkah walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil sesuai dengan rencana. Terimakasih sudah percaya, berjuang dan tidak menyerah. Terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Semoga segala usaha ini menjadi jalan menuju kebaikan dan keberhasilan. Sehat selalu dan bahagia selalu.

## ABSTRAK

### **SITI NURLELA. Upaya Mempertahankan Opini WTP pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan DKI Jakarta melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.**

WTP merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai kewajaran sebuah laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini WTP, diperlukan penerapan yang efektif terhadap Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh penerapan ketiga aspek tersebut dalam mempertahankan opini WTP pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Di mana data yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait, observasi langsung serta analisis dokumen keuangan dan kebijakan internal. Metode analisis data menggunakan tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan hasil dari dokumentasi yang diuji keabsahannya dengan data dari wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pemasarakatan sejak tahun 2022 membentuk Tim PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) yang bertugas melakukan pengendalian internal. Laporan keuangan yang dihasilkan juga sudah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan keuangan disusun mulai dari proses penganggaran sampai dengan pelaporan menggunakan aplikasi SAKTI sejak tahun 2022. Ketiga faktor tersebut berpengaruh dalam mempertahankan opini WTP. Sehingga, Direktrat Jenderal Pemasarakatan memperoleh opini WTP berturut – turut.

Kata kunci: Opini WTP, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

## ABSTRACT

**SITI NURLELA. Efforts to Maintain the Unqualified Opinion at the Directorate General of Corrections DKI Jakarta through the Implementation of Internal Control Systems, Government accounting Standards and Agency-Level Financial Application Systems.**

WTP is the main indicator used to assess the fairness of a financial report. To maintain the WTP opinion, an effective application of the Internal Control System, Government Accounting Standards and the Agency Level Financial Application System is required. This study aims to analyze how the application of these three aspects affects maintaining the WTP opinion at the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights.

This research uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach. Where data obtained through interviews with relevant officials, direct observation and analysis of financial documents and internal policies. The data analysis method uses three steps: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data validity test uses a triangulation technique where the results of the documentation are tested for validity with data from interviews.

The results showed that the Directorate General of Corrections since 2022 formed the PIPK Team (Internal Control over Financial Reporting) which is tasked with carrying out internal control. The resulting financial statements are also in accordance with SAP (Government Accounting Standards). Financial reports are prepared from the budgeting process to reporting using the SAKTI application since 2022. These three factors are influential in maintaining the WTP opinion. Thus, the Directorate General of Corrections obtained WTP opinion consecutively.

**Keywords:** Unqualified Opinion, Internal Control System, Government Accounting Standards, and Agency-Level Financial Application System.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

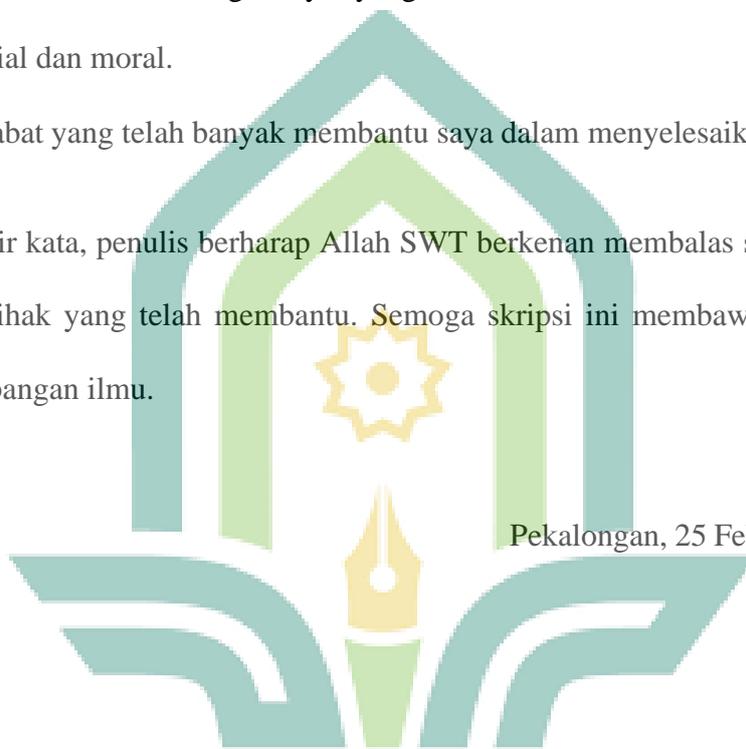
1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan FEBI Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.,M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Ahmad Rosyid, S.E., M.Si., Ak.CA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E., Akt. M.S.A., C.A selaku Sekretaris Jurusan

Akuntansi Syariah FEBI UIN K. H Abdurrahman Wahid Pekalongan

7. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
8. Pihak Direktorat Jenderal Pemasarakatan DKI Jakarta yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 25 Februari 2025



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II</b> .....	15
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	15
A. Landasan Teori.....	15
B. Telaah Pustaka.....	24
C. Kerangka berpikir .....	31
<b>BAB III</b> .....	33
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Setting Penelitian .....	33
D. Subjek Penelitian .....	35
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36

G. Teknik Keabsahan Data .....	37
H. Metode Analisis Data .....	38
<b>BAB IV</b> .....	40
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
A. Gambaran Umum Instansi .....	40
B. Hasil dan Pembahasan .....	44
<b>BAB V</b> .....	70
<b>PENUTUP</b> .....	70
A. Simpulan .....	70
B. Keterbatasan Penelitian .....	72
C. Saran Penelitian .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
<b>LAMPIRAN</b> .....	I
<i>Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian</i> .....	I
<i>Lampiran 2 Surat Izin Penelitian</i> .....	II
<i>Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian</i> .....	III
<i>Lampiran 4 Instrumen Pedoman Wawancara</i> .....	VI
<i>Lampiran 5 Transkrip Wawancara</i> .....	IX
<i>Lampiran 6 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan</i> .....	XXX
<i>Lampiran 7 Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian</i> .....	LIV
<i>Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup Penulis</i> .....	LV

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surak Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	esdan ye
ش	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذَكَرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هُوْلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...آىَ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...ؤ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

#### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

##### 1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

-- raudatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talḥah

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

### 3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu

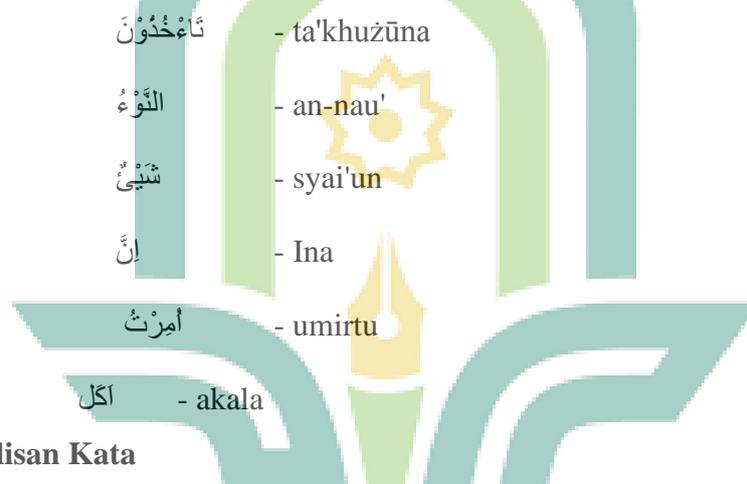
السَّيِّدِ - as-sayyidu

الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursahā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti  
manistaṭā’a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti  
manistaṭā’a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَأًا

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsil  
allażī bibakkat amubārakan

شَهْرُ رَمَازَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-  
Qur’ānu

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhil  
Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubīn

Walaqadra’āhubil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamīn

## Alhamdulillahirabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Naṣrunminallāhiwafathunqarīb
بِاللَّهِ الْأَمْرِ جَمِيعًا	Lillāhi al-amrujamī’an
	Lillāhil-amrujamī’an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhabikullisyai’in ‘alīm

### 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan.....	25
Tabel 4. 1 Hasil wawancara sistem pengendalian internal .....	45
Tabel 4. 2 Hasil wawancara standar akuntansi pemerintahan.....	53
Tabel 4. 3 Hasil wawancara SAKTI.....	62



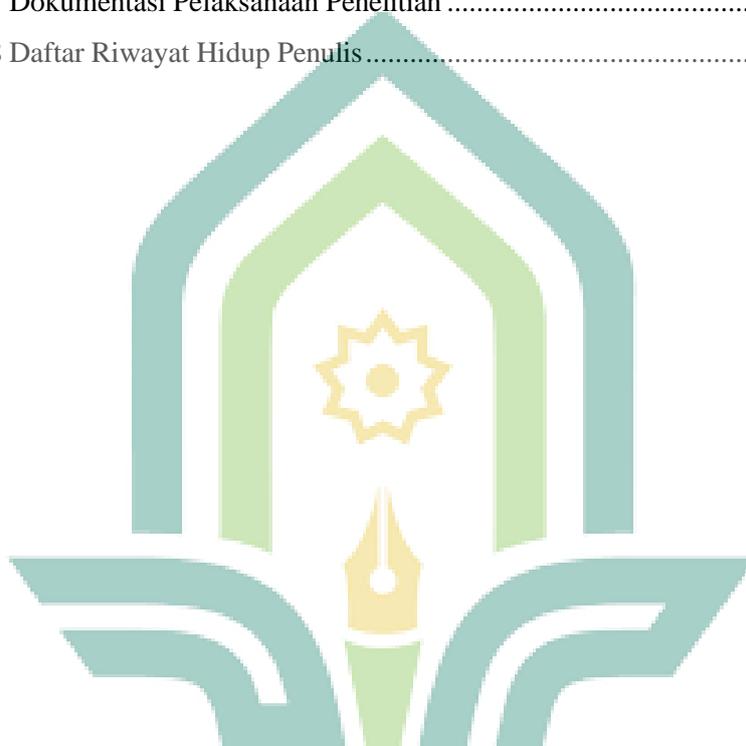
## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1 Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 s.d. 2022.....</b>	<b>3</b>
<b>Gambar 2. 1 Perbandingan SAKTI dengan Aplikasi Eksisting .....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir .....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Keunangan.....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 4. 3 Relasi antar Modul.....</b>	<b>58</b>
<b>Gambar 4. 4 Pengguna Operasional SAKTI.....</b>	<b>60</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian.....	I
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	II
Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian .....	III
<i>Lampiran 4 Instrumen Pedoman Wawancara.....</i>	<i>VI</i>
Lampiran 5 Transkrip Wawancara .....	IX
Lampiran 6 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.....	XXX
Lampiran 7 Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian .....	LIV
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	LV



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin berkembangnya sektor publik di Indonesia, semakin penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun tata kelola yang efektif. Keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar tata kelola pemerintahan yang efektif dapat terwujud, pemerintah harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Setelah itu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan memeriksa data dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut untuk menentukan kebenaran, keakuratan, keterpercayaan, dan kejujurannya. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, yang mencakup penilaian atas tingkat kewajaran data yang diberikan dalam laporan keuangan pemerintah, akan mensintesis temuan-temuan pemeriksaan (UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), 2004).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang diidam-idamkan oleh seluruh entitas pemerintah dari berbagai opini yang dapat diberikan oleh BPK RI. Bagi instansi pemerintah, opini WTP merupakan

sebuah kemenangan dan kebanggaan, sekaligus sebagai upaya untuk mencapai salah satu tujuan RPJMN. BPK telah memeriksa empat puluh tujuh kriteria. Temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan tahun 2022, pemerintah telah meningkatkan kinerjanya di satu bidang. Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 s.d. 2023 disampaikan pada data berikut:



No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	016	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Pechubangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi <sup>1)</sup>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional <sup>2)</sup>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara <sup>3)</sup>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Kehormatan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

(BPK, 2024)

**Gambar 1. 1 Rincian hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2018 s.d. 2022**

Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu instansi yang telah memperoleh opini WTP, seperti yang terlihat dari tabel di atas. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Kemenkumham sendiri mendapatkan opini WTP secara berturut-turut. Untuk mendapatkan opini WTP, Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan, telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan opini WTP, Kementerian Hukum dan HAM secara konsisten melakukan pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Inang Sh, 2023).

Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah salah satu departemen yang berfungsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, laporan keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Masyarakat dan pemangku kepentingan akan menilai kinerja Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan berdasarkan kinerja unit-unitnya, sehingga persepsi terhadap Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan dipengaruhi oleh opini WTP yang diperolehnya. Untuk mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh, Kementrian Hukum dan HAM, khususnya Diektorat Jenderal Pemasarakatan harus melakukan beberapa upaya. Pengelolaan dan administrasi persediaan dan aset tetap yang masih belum maksimal merupakan salah satu dari sekian banyak area yang membutuhkan perhatian yang signifikan. yang dapat dikelola oleh aplikasi MonSakti utama dalam pelaporan keuangan (Susanti et al., 2022).

Secara ideal, sistem pengendalian internal sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa proses pengelolaan keuangan dilakukan sesuai aturan, bebas dari kecurangan, serta mampu mengantisipasi risiko sejak dini. Mekanisme pengendalian yang efektif yang diterapkan oleh organisasi untuk menjamin keandalan catatan keuangan dan non-keuangan, seperti kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang akan menjamin pencapaian tujuan organisasi, disebut sebagai sistem pengendalian yang efektif (Enita Binawati, 2022).

Kemudian, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menurut PP No. 71 Tahun 2010 menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh dan transparan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus diikuti ketika menyiapkan laporan keuangan pemerintah, dan penyerahan yang tepat waktu sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi (Jati, 2019). Laporan keuangan Kemenkumham juga bisa mendapat opini WTP karena penyusunan laporan keuangan Kemenkumham khususnya pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang merupakan pedoman dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang sehat (Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2022). Laporan keuangan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah laporan yang terorganisir mengenai status keuangan dan kegiatan suatu lembaga pelaporan. Dalam upaya untuk

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia, SAP merupakan kewajiban yang mengikat secara hukum (Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, 2021).

Untuk mendukung efektivitas SPI dan SAP, pemerintah juga mengembangkan SAKTI sebagai sistem aplikasi terintegrasi berbasis teknologi digital yang mencakup penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan secara daring dan real-time. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sebuah sistem aplikasi terintegrasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, dapat diakses oleh seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat di seluruh Indonesia. Dengan tahap uji coba terbatas (piloting) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.05/2015 dan nomor 131/PMK.05/2016, SAKTI telah diimplementasikan dengan lebih baik sejak tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019, tanggal 27 Desember 2019, yang mengubah PMK-159/PMK.05/2018, tanggal 14 Desember 2018, tentang Pelaksanaan Uji Coba (Muldiyanto, 2021). Mulai tahun 2022, seluruh kementerian dan lembaga di bawah pemerintah pusat harus menggunakan SAKTI secara keseluruhan (full module). SAKTI diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan negara dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kecepatan konsolidasi. Selain itu, hal ini akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan laporan keuangan. SAKTI yang diusulkan akan menggabungkan kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pembuatan laporan keuangan; dalam proses penyusunan

anggaran, fungsi-fungsi tersebut akan digabungkan ke dalam RKAKL, DIPA, dan revisi DIPA (Rinna, 2024). SAKTI juga digunakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk administrasi keuangan, termasuk perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Namun, dalam kenyataannya, belum semua sistem tersebut berjalan secara ideal. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022, BPK mencatat 16 temuan yang menunjukkan masih adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah: penerapan SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan yang belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian memadai; adanya data anomali dalam migrasi persediaan dari e-Rekon&LK ke SAKTI; serta pengendalian reklasifikasi masuk dan keluar pada aplikasi MONSAKTI yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah dibangun secara nasional, masih ada celah dalam implementasi teknis dan pengendalian di tingkat satuan kerja (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, 2023).

Kesenjangan antara idealita dan realita inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Secara normatif, sistem pengendalian internal, SAP, dan sistem aplikasi seperti SAKTI telah disiapkan dan dijalankan. Namun, catatan dan temuan dari BPK serta kondisi pelaksanaan di lapangan mengindikasikan bahwa efektivitas ketiganya masih perlu ditelusuri

lebih lanjut dari perspektif pelaksanaannya di lapangan.

Kesenjangan antara harapan ideal dan kondisi riil tersebut menjadi alasan utama pentingnya dilakukan penelitian. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah penerapan SPI, SAP, dan SAKTI benar-benar telah efektif dalam mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan mempertahankan opini WTP? Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi ketiga sistem tersebut dijalankan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan teori stewardship, yang memandang bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana (steward) diberikan kepercayaan, sistem yang mendukung, serta pembinaan yang memadai dari organisasi.

Penelitian Putra & Varina, (2021), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu disusun dengan menggunakan SAP berbasis akrual, dan hal ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya oleh BPKAD. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk memperluas jumlah dan kualitas alat pengelolaan anggaran yang tersedia di setiap OPD dan menyediakan situs web untuk setiap OPD di Kota Bengkulu. Pemantauan yang lebih langsung dari atasan di semua tingkatan juga diperlukan, baik di tingkat kelompok perangkat daerah maupun pemerintah daerah.

Penelitian Gultom & Harahap, (2024), ditarik kesimpulan bahwa

pembuatan laporan keuangan secara khusus dan manajemen keuangan secara umum telah mendapatkan manfaat dari penggunaan aplikasi SAKTI. Namun demikian, SAKTI masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lebih lanjut. Untuk meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan, pengelola sistem harus memberikan keleluasaan kepada pengguna dalam mengolah data.

Berdasarkan penelitian terlebih dahulu, secara khusus tidak ada yang mengkaji pengaruh tiga variabel yaitu Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansu secara bersama-sama. Banyak penelitian yang hanya memfokuskan pada satu atau dua variabel dalam pelaporan keuangan. Dimana ketiga variabel tersebut juga dapat berpengaruh dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan ketiga variabel dalam satu kerangka penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengangkat penelitian yang berjudul **“Upaya Mempertahankan Opini WTP pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan DKI Jakarta melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut.

- 1 Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP?
- 2 Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP?
- 3 Bagaimana penerapan sistem palikasi keuangan tingkat instansi pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP
- b. Untuk menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP
- c. Untuk menganalisis penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam upaya mempertahankan opini WTP

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait, antara lain:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian tentang penggunaan standar akuntansi pemerintahan, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, dan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan dapat menjadi peta jalan atau kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi. Penelitian ini diyakini akan memajukan pemahaman kita tentang ilmu akuntansi, khususnya akuntansi syariah, dengan menentukan bagaimana sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah, dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang digunakan dalam upaya menegakkan opini WTP.

### b. Manfaat Praktis

#### i. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami bagaimana standar akuntansi pemerintahan, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, dan sistem pengendalian internal diterapkan dalam upaya mempertahankan opini WTP. Selain itu, pemahaman mahasiswa juga diharapkan dapat bertambah, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran untuk

membandingkan aplikasi dan pengetahuan dalam praktik yang sebenarnya dengan teori yang telah diperoleh untuk dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

ii. **Bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham**

Studi ini dapat menjadi panduan bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang dalam rangka menjamin pengelolaan keuangan yang efisien dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga dapat mempertimbangkan untuk memperkuat pengendalian internal untuk mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas tinggi.

iii. **Bagi Pembaca**

Mengenai dampak dari penerapan sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dalam upaya mempertahankan opini WTP, penelitian ini dapat menawarkan bahan tertulis yang dapat diandalkan.

#### D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mencakup pembahasan metodologis yang menyinggung rencana yang menguraikan atau memperjelas topik dan metodologi penelitian sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Langkah-langkah berikut ini harus diikuti dalam penelitian ini agar sesuai dengan pedoman tersebut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang masalah, berisi mengenai Fenomena sosial disertakan bersama dengan masalah dan urgensi penelitian, alasan obyektif pemilihan lokasi, dan penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian sebelumnya.
2. Rumusan masalah, mengajukan pertanyaan berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian pada latar belakang masalah dan memerlukan jawaban dalam bentuk deskripsi atau pola naratif dari suatu kegiatan penelitian.
3. Tujuan penelitian, tujuan atau hasil yang diinginkan untuk sebuah penelitian.
4. Manfaat penelitian, tujuan penelitian ini dicapai dengan metode teoritis dan praktis.
5. Sistematika pembahasan, kerangka kerja untuk mengatur dan menyajikan data secara metodis dan logis.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

1. Landasan teori, mencakup teori-teori yang menyeluruh beserta teori-teori pelengkap untuk memberikan panduan atau parameter bagi penelitian.
2. Telaah pustaka, mencakup sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi temuan-temuan studi yang baru.
3. Kerangka berpikir, menggunakan grafik dasar untuk mengilustrasikan alur proses pemecahan masalah penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian, pendekatan penelitian, latar penelitian, demografi dan sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, semuanya tercakup dalam bab ini

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Temuan-temuan dari analisis data penelitian yang terkumpul disajikan dalam bab ini, bersama dengan diskusi tentang temuan-temuan tersebut yang diinterpretasikan secara sederhana untuk menjawab isu-isu utama yang diangkat dalam perumusan masalah.

## **BAB V SIMPULAN**

Bab ini mencakup kesimpulan penelitian yang diperoleh dari analisis data dan diskusi yang ditawarkan dalam penelitian ini, bersama dengan daftar kekurangan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori *Stewardship*

Penelitian ini menerapkan teori *stewardship* pada pelaporan keuangan. Menurut pandangan ini, *stewardship* harus memprioritaskan pencapaian tujuan organisasi daripada mengejar kepentingan pribadi (Asmawanti-S & Soya, 2023). Donaldson dan Davis (1991) menyatakan bahwa teori *stewardship* mengkararakteristikkan para manajer yang memprioritaskan tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi. Selain itu, teori penatalayanan membantu menjelaskan hubungan yang saling terkait antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Maharani & Sari, 2021).

Akuntansi memunculkan teori *Stewardship*, yang kemudian diperluas ke domain keilmuan lainnya. *Stewardship* teori mulai digunakan di sektor publik untuk lebih memahami dan meningkatkan manajemen sumber daya publik. Menurut teori *Stewardship*, kepuasan pemilik dan kesuksesan organisasi sangat erat kaitannya. Pemerintah akan melakukan segala upaya untuk mengelola pemerintahan dengan cara yang memajukan kesejahteraan rakyat. Rakyat, yang merupakan pemilik pemerintah, akan senang dengan kinerja pemerintah jika tujuan ini tercapai.

Impilikasi teori *Stewardship* dalam penelitian ini adalah menyoroti betapa pentingnya bagi para pengelola untuk menangani sumber daya yang diberikan kepada mereka. Penggunaan sumber daya dan anggaran secara

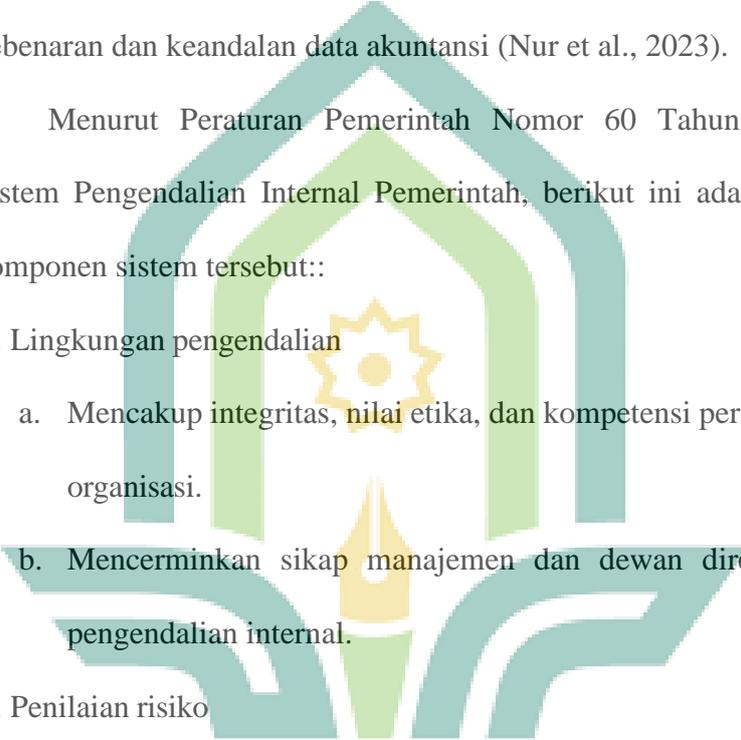
efisien dan efektif untuk kepentingan publik merupakan tanggung jawab pengelola keuangan. Dedikasi pengelola untuk menegakkan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan akan ditunjukkan dengan penerapan pengendalian internal yang efektif. Teori ini mendorong transparansi dan akuntabilitas. Teori *stewardship* mendukung penggunaan teknologi untuk membantu para pengelola mencapai tujuan mereka. Ketika mempertimbangkan penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, standar akuntansi pemerintah, dan pengendalian internal, perspektif *Stewardship* akan membuatnya menjadi lebih jelas.

## 2. Pengendalian Internal

Sesuai dengan Pasal 1 (10) Sistem pengendalian internal, sebagaimana didefinisikan oleh Permendagri No.60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah, adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh mekanisme pengawasan yang berasal dari dalam instansi pemerintah (Wiranti, 2021). Pengendalian internal adalah metode, struktur organisasi, dan tindakan terkoordinasi yang digunakan untuk melindungi aset entitas, memverifikasi keakuratan dan kemitakhiran data akuntansi, meningkatkan akurasi, dan memperkuat kepatuhan terhadap aturan.

Menurut Widyaningrum (2009), pengendalian internal dapat dipisahkan menjadi dua kategori: pengendalian internal administratif dan pengendalian internal akuntansi, tergantung pada tujuannya. Pengendalian internal administratif berfokus pada peningkatan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, sedangkan pengendalian internal akuntansi berfokus pada perlindungan aset organisasi dan memastikan kebenaran dan keandalan data akuntansi (Nur et al., 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, berikut ini adalah komponen-komponen sistem tersebut::

- 
1. Lingkungan pengendalian
    - a. Mencakup integritas, nilai etika, dan kompetensi personel organisasi.
    - b. Mencerminkan sikap manajemen dan dewan direksi terhadap pengendalian internal.
  2. Penilaian risiko

Proses menemukan, mengevaluasi, dan memutuskan bagaimana mengelola risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.
  3. Kegiatan pengendalian

Aturan dan pedoman yang mendukung pelaksanaan arahan manajerial. Terdiri dari pengendalian fisik, pemisahan tugas, otorisasi, verifikasi, dan rekonsiliasi.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Sistem untuk mengidentifikasi, menangkat, dan mengkomunikasikan dengan cara dan kecepatan yang memungkinkan orang untuk melakukan pekerjaan mereka. Komunikasi yang efektif dalam seluruh organisasi terkait dengan ekspektasi dan tanggung jawab pengendalian.

#### 5. Pemantauan pengendalian internal

Proses untuk menilai keefektifan pengendalian internal secara berkala, memastikan bahwa pengendalian internal beroperasi dengan benar, dan menyesuaikan dengan kondisi yang berubah (Neli Sri Mulyati, Eva Faridah, 2019).

Setiap entitas akuntansi, entitas pelaporan, dan tingkat proses atau transaksi menerapkan PIPK. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pemasarakan Kemenkumham menerapkan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengkinian dokumentasi penerapan PIPK menjadi tanggung jawab masing- masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Mengingat bahwa opini WTP adalah kriteria yang diperlukan dan disyaratkan dan bukan kriteria pengecualian, PIPK dimaksudkan untuk memberikan tingkat keyakinan yang wajar bahwa pelaporan keuangan dilakukan dengan pengendalian internal yang memadai. Setiap K/L harus mendapatkan WTP. PIPK memiliki lima prinsip panduan yang harus diikuti: PIPK harus mendukung pencapaian tujuan organisasi; PIPK merupakan komponen penting dalam proses organisasi dan

pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan strategis; PIPK harus dinilai secara metodis, terstruktur, dan tepat waktu; PIPK harus mempertimbangkan rasio biaya-manfaat; dan PIPK harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan (Tri Hadi Putra, 2020).

### 3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan, atau disingkat SAP, lahir dari manajemen yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, terorganisir, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sesuai dengan informasi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP Untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencakup informasi yang akurat dan menyeluruh, standar ini mengamanatkan bahwa laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, yang menciptakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 (Apriansyah et al., 2020). Langkah pertama untuk membangun administrasi keuangan negara adalah dengan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. Dalam waktu lima tahun setelah pengesahan undang-undang tersebut, Pemerintah Indonesia harus menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual (Putra & Varina, 2021).

Dalam akuntansi berbasis akrual, transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya dilacak, dibukukan, dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, terlepas dari penerimaan atau pembayaran kas atau setara kas. Karena semua arus sumber daya dicatat dan waktu pencatatan sesuai dengan waktu arus sumber daya, maka pelaporan akuntansi berbasis akrual dapat memberikan informasi yang paling menyeluruh (Yusriwati, 2022). Terdapat perbedaan antara standar basis kas dan standar basis akrual. Hanya ketika transaksi dilakukan secara tunai, maka transaksi tersebut dicatat menurut standar akuntansi basis kas. Jumlah utang dan piutang harus didokumentasikan bersama dengan transaksi pengeluaran dan penerimaan kas di bawah aturan akuntansi berbasis akrual. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan tujuh laporan keuangan utama yang dihasilkan ketika akuntansi berbasis akrual diterapkan (Putra & Varina, 2021). Beberapa indikator dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akrual:

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan (Anita Sari, 2022)

Menerapkan akuntansi berbasis akrual pada penyajian laporan keuangan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana pemerintah memenuhi target pendanaan dan

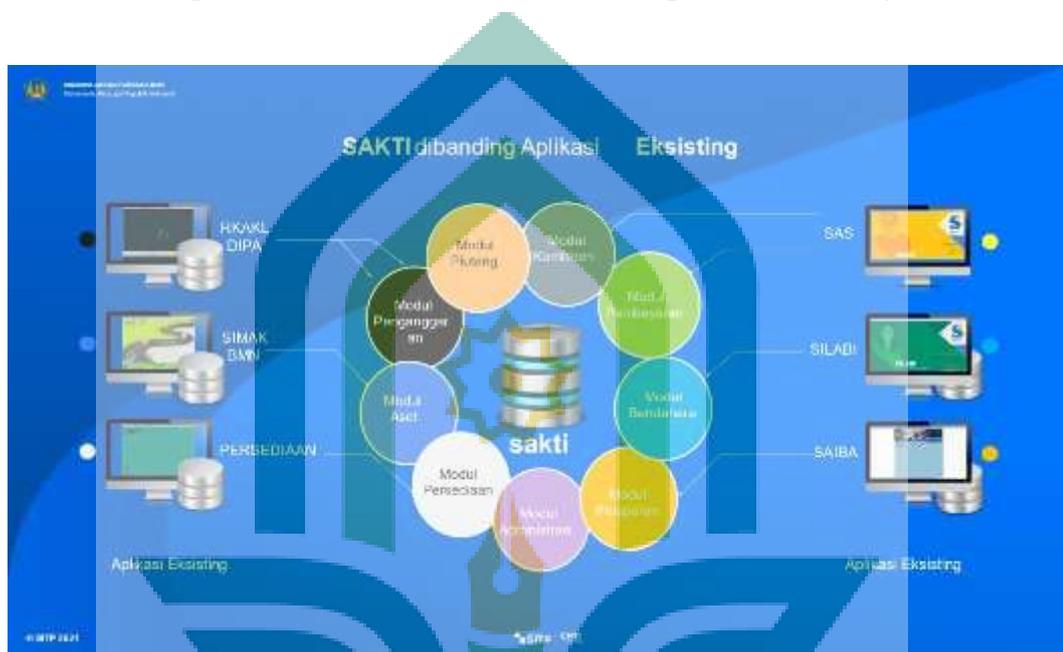
mendanai kegiatan-kegiatannya.

- b. Memberikan informasi yang tepat dan konkret tentang hak dan kewajiban lembaga terkait.
- c. Membantu mengevaluasi efektivitas, biaya layanan, dan pencapaian tujuan pemerintah.
- d. Menunjukkan keadaan keuangan pemerintah dan bagaimana perubahannya (Lina Rosana, 2023).

#### 4. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

Satuan kerja (satker) dapat menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk membantu pelaksanaan SPAN dengan melakukan tugas-tugas pengelolaan keuangan, seperti pertanggungjawaban anggaran dan tahap perencanaan (R. Permata, 2021). SAKTI merupakan pelengkap Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yang memodernisasi administrasi keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan secara resmi diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2015. Tahapan awal dalam pengembangan SAKTI secara progresif adalah desain aplikasi, analisis kebutuhan, studi kelayakan, dan pengembangan aplikasi. Setelah lima kali masa uji coba, seluruh kementerian dan lembaga menerima modul SAKTI secara lengkap pada akhir tahun 2021 untuk transaksi APBN 2022 (Djpb Kemenkeu, 2022). Setiap aplikasi unit kerja yang saat ini digunakan diintegrasikan oleh SAKTI. SAKTI menggunakan konsep basis data tunggal. Seluruh Kementerian dan Lembaga menggunakan SAKTI untuk keperluan

akuntansi dan pelaporan. Sebagai upaya untuk menggantikan sistem akuntansi sebelumnya yang terpisah-pisah dan kurang terintegrasi, SAKTI diperkenalkan. Tujuan utama SAKTI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan lembaga pemerintah. SAKTI berbeda secara signifikan dengan aplikasi versi sebelumnya. Berikut ini adalah perbedaan utama antara SAKTI dan aplikasi sebelumnya:

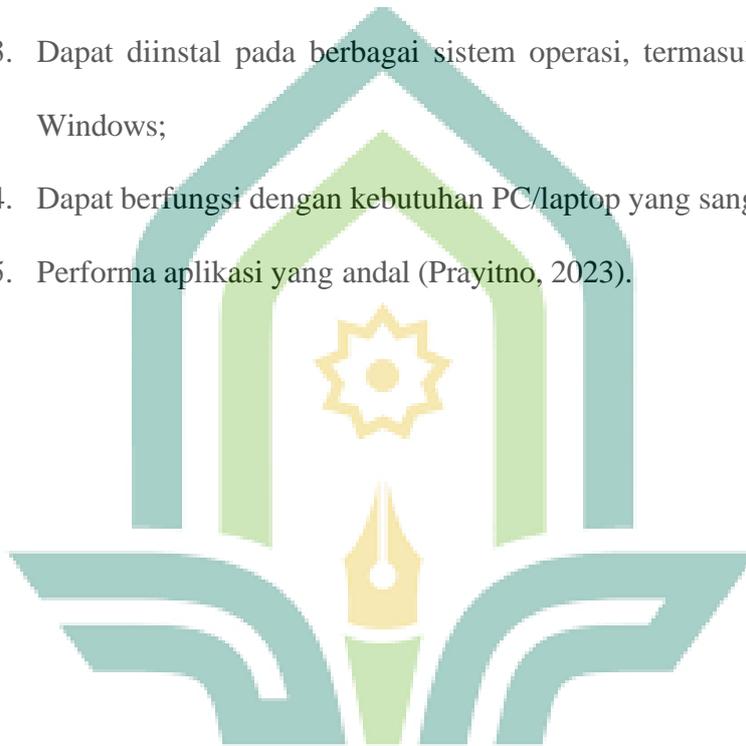


**Gambar 2. 1 Perbandingan SAKTI dengan Aplikasi Eksisting**

Dengan bantuan SAKTI, sejumlah aplikasi pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri dikonsolidasikan ke dalam satu aplikasi dengan basis data yang terintegrasi (Djpb Kemenkeu, 2019). Modul-modul dalam SAKTI mencakup segala hal mulai dari penganggaran hingga pelaporan. Modul ini mencakup modul administrasi, penganggaran, komitmen, pembayaran, perbendaharaan, inventaris, aset tetap, dan pelaporan. Setiap modul masih menggunakan platform yang sama dan terhubung dengan modul lainnya. Aplikasi seperti RKA-KL,

SAS, SILABI, SIMAK-BMN, dan SAIBA telah digunakan pada aplikasi satker sebelumnya.. Selain itu, terdapat perbedaan antara SAKTI dengan aplikasi satker sebelumnya, sebagai berikut :

1. Memanfaatkan satu basis data terpusat;
2. Memiliki teknik enkripsi dan dekripsi yang lebih aman. Arsip Data Komputer (ADK)
3. Dapat diinstal pada berbagai sistem operasi, termasuk Linux dan Windows;
4. Dapat berfungsi dengan kebutuhan PC/laptop yang sangat minimum;
5. Performa aplikasi yang andal (Prayitno, 2023).



## B. Telaah Pustaka

Penelitian yang menguji pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh (N. R. Permata & Dethan, 2021) dan (Rahmany & Fatimah, 2020). Hasil ini menunjukkan bagaimana Sistem Pengendalian Internal digunakan ketika laporan keuangan sedang disusun. Sistem pengendalian internal ini diterapkan untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Pada penelitian yang menguji penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilakukan oleh (Putra & Varina, 2021), (Lina Rosana, 2023) dan (Siti Rahmawati, Cris Kuntadi, 2023). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun SAP berbasis akrual telah digunakan, khususnya oleh BPKAD, untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masih diperlukan lebih banyak sumber daya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Standar ini mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang mempengaruhi aspek-aspek atau ukuran-ukuran kesetaraan pelaporan akuntansi dan digunakan untuk membuat pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Pada penelitian yang meneliti penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang dilakukan oleh (Usman, 2024), (Prayitno, 2023), dan (Ismail & Sasmito Jati Utama, 2022). Program SAKTI diimplementasikan tanpa masalah, namun ada beberapa masalah, seperti koneksi internet yang buruk dan kurangnya pelatihan pengguna.

Tabel 2. 1

## Penelitian Relevan

No.	Penulis, Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kartin Usman, Hartati Tuli, Amir Lukum, 2024 “Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo”	Metode Kualitatif	Meskipun masih ada beberapa tantangan, seperti pelatihan pengguna dan jaringan internet yang kurang baik, aplikasi SAKTI telah digunakan di BNNP Gorontalo. Penggunaan SAKTI untuk menyampaikan data keuangan sangat memudahkan pekerjaan. Karena pengguna SAKTI hanya perlu berurusan dengan modul-modul yang mereka miliki, SAKTI sangat mudah digunakan. Data tersebut juga dapat digabungkan dengan modul-modul lainnya. (Usman, 2024).	1. Variabel Independen : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 2. Metode Penelitian	1. Variabel Independen : Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan 3. Tahun Penelitian 4. Studi Kasus
2	Patriot Budi Prayitno, 2023, “Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lpp Tvri)”	Metode Kualitatif	SAKTI berguna untuk memenuhi persyaratan pengembangan IFMIS. Selain itu, SAKTI merupakan sistem terpusat dan terukur yang mewujudkan e-government (Prayitno, 2023).	1. Variabel Independen : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 2. Metode Penelitian	1. Variabel Independen : Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal 2. Tahun Penelitian 3. Studi Kasus

3	Maulida Rizki Nur Hanifa Ismail, Sasmito Jati Utama, 2022, “Penerapan SAKTI dalam Sistem Informasi Akuntansi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur “	Metode Kualitatif	SAKTI, sebuah alat bantu terintegrasi yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah dalam pelaporan keuangan instansi, telah memungkinkan kementerian dan lembaga untuk berinovasi. Dari seluruh penelitian ini, terlihat jelas bahwa, meskipun ada beberapa masalah kecil, instalasi berfungsi dengan sempurna secara keseluruhan (Ismail & Sasmito Jati Utama, 2022).	1. Variabel Independen: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 2. Metode Penelitian	1. Variabel Independen : Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal 2. Tahun Penelitian 3. Studi Kasus Penelitian
4	Septian Asriadi Putra, Rara Juniar Varina, 2021 “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu”	Metode Kualitatif	Berdasarkan peraturan dan perundangan, SAP telah digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu, khususnya oleh BPKAD. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perangkat pengelolaan anggaran, setiap OPD masih membutuhkan sistem aplikasi teknologi. Karena setiap OPD memiliki sumber daya yang terbatas, maka diperlukan metode penerapan teknologi (Putra & Varina, 2021)	1. Variabel Independen : Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Metode Penelitian	1. Variabel Independen : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Pengendalian Internal 2. Studi Kasus

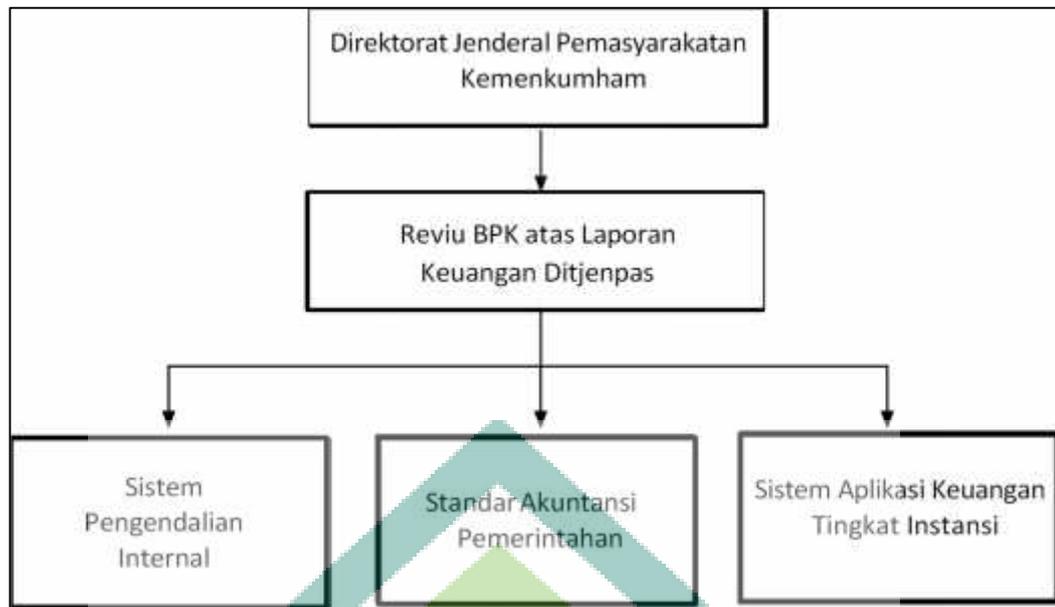
5	Lina Rosana, Risma Wira Bharata, 2023 “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan”	Metode Kualitatif	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdampak pada kinerja laporan keuangan yang disajikan selama proses penyajian. Namun demikian, dengan berbagai alasan, terutama Sumber Daya Manusia (SDM), di mana SDM yang ada saat ini masih belum memiliki pelatihan dan keahlian yang memadai, beberapa instansi pemerintah belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan yang ada saat ini (Lina Rosana, 2023).	1. Variabel Independen : Standar Akuntansi Pemerintah, 2. Metode Penelitian	1. Variabel Independen : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Pengendalian Internal 2. Tahun Penelitian 3. Studi Kasus
6	Siti Rahmawati, Cris Kuntadi, Rachmat Pramukty, 2023 “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sosialisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah, Penyetaraan Pelaporan Pada Kantor Desa Karang Satria”	Metode Kualitatif	Dimensi atau indikator kesetaraan pelaporan akuntansi digunakan untuk membuat penilaian dan berkonsultasi dengan kebijakan akuntansi saat membuat laporan keuangan berbasis akrual, yang berpengaruh pada pelaporan akuntansi pemerintah. (Rahmawati et al., 2023).	1. Variabel Independen : Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Metode Penelitian	1. Variabel Independen : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Pengendalian Internal 2. Tahun Penelitian 3. Studi Kasus

7	Natalia Rosi Permata, Minarni Anaci Dethan Saiful Ihsan Al Faruq, 2021 “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Kualitas Pelaporan Keuangan Yayasan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Maumere”	Metode Kualitatif	Masih terdapat beberapa komponen pengendalian internal yang belum diterapkan dengan baik, sehingga sistem pengendalian internal Yakkestra belum sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian internal berdasarkan teori COSO (N. R. Permata & Dethan, 2021).	1. Variabel Independen : Pengendalian Internal 2. Metode Penelitian	1. Variabel Independen : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Tahun Penelitian 3. Studi Kasus
8	Sri Rahmany, Fatimah, 2020 “Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam”	Metode Kualitatif	Selain mengelola laporan dan catatan keuangan, sistem pengendalian intern Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mengawasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber-sumber yang digunakan untuk membuat laporan keuangan antara lain laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), dan catatan atas laporan keuangan (Rahmany & Fatimah, 2020)	1. Variabel Independen : Pengendalian Internal 2. Metode Penelitian	1. Variabel Independen : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Tahun Penelitian 3. Studi Kasus

9	<p>Corry Margaretha Jayanti Gultom, Siti Nurwahyuningsih Harahap, 2024 “Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerinah”</p>	Metode Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penilaian terhadap SAKTI untuk pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan model HOT-Fit, sistem ini telah berjalan dengan cukup baik. Ketanggapan pengelola SAKTI membuat pengguna merasa puas meskipun fitur-fitur sistem belum sepenuhnya siap pada awal implementasi. Tahun ini, pengembangan dan penyempurnaan sistem akan terus dilakukan dan dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan unit kerja (Gultom &amp; Harahap, 2024).</p>	<p>1. Variabel Independen : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 2. Metode Penelitian 3. Tahun Penelitian</p>	<p>1. Variabel Independen : Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal 2. Studi Kasus</p>
10	<p>Anggraini Triaski Ramadhani, Erna Sulistyowati, 2022 “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah”</p>	Metode Kualitatif	<p>Sistem Informasi Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik PT Syncore Indonesia digunakan oleh Puskesmas X, sebuah satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah, untuk menghasilkan laporan keuangan tahun 2021 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Puskesmas X mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dalam menyusun laporan keuangannya (Ramadhani &amp; Sulistyowati, 2022).</p>	<p>1. Variabel Independen : Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Metode Penelitian</p>	<p>1. Variabel Independen : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Pengendalian Internal 2. Tahun Penelitian 3. Studi Kasus</p>

### C. Kerangka berpikir

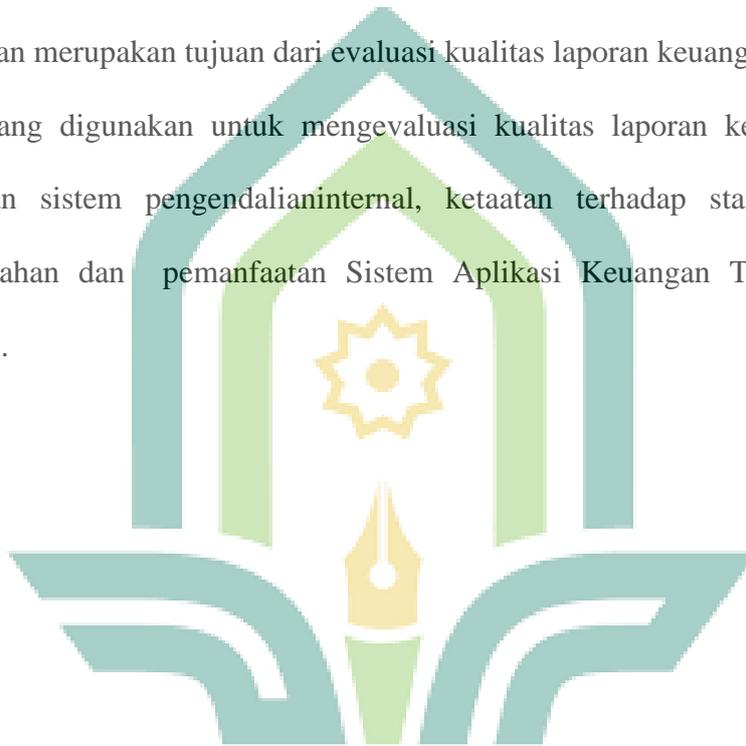
Peneliti dalam studi ini menggunakan kerangka kerja untuk menguji efek potensial dari variabel-variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan. Proses dan implementasi pengendalian internal akan diuji dalam penelitian ini untuk menjamin integritas data keuangan. Selain itu, studi ini akan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang ada saat ini. Studi ini juga akan menilai kepatuhan pelaporan keuangan Ditjenpas Kemenkumham terhadap peraturan akuntansi pemerintah dan dampaknya terhadap akuntabilitas dan transparansi. Proses pengintegrasian sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dalam pelaporan keuangan akan diuji dalam penelitian ini. Untuk menentukan kontribusi pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, temuan studi dari variabel-variabel ini akan diperiksa secara menyeluruh. Maka peneliti menggambarkan model penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir**

Di Indonesia, layanan pemasyarakatan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), yang merupakan berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Untuk menjaga kepercayaan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham harus secara rutin merilis data keuangannya. Sebagai lembaga pemerintah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diwajibkan oleh undang-undang untuk menjunjung tinggi keterbukaan dan akuntabilitas publik. Masyarakat diberikan informasi yang menyeluruh dan mudah dipahami mengenai pengelolaan dan penggunaan dana publik melalui pelaporan keuangan terbuka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana uang pajak digunakan oleh organisasi pemerintah seperti Ditjenpas. Masyarakat dapat mengetahui efektivitas, efisiensi, dan transparansi manajemen keuangan Ditjenpas dari laporan keuangannya. Ditjenpas dan organisasi pemerintah secara umum dapat meningkatkan

kepercayaan publik dengan memberikan laporan keuangan yang transparan dan berkualitas tinggi. Selain itu, hal ini juga dapat memperkuat posisi Ditjenpas sebagai organisasi yang akuntabel dan transparan dalam mengelola dana publik. Mengetahui apakah laporan keuangan Ditjenpas sudah benar, relevan, dapat dibaca, dapat dipahami, memiliki kepastian hukum, komprehensif, mengungkapkan semua informasi yang relevan, serta dapat dipercaya dan diandalkan merupakan tujuan dari evaluasi kualitas laporan keuangan. Tiga faktor utama yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan adalah penerapan sistem pengendalian internal, ketaatan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah kategori yang menjadi bagian dari penelitian ini. Untuk menyelidiki dan memahami fenomena, termasuk apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana hal itu terjadi, penelitian kualitatif dilakukan dalam latar alamiah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dari penelitian kualitatif adalah gagasan untuk melakukan eksplorasi, yang memerlukan studi mendalam dan berorientasi pada kasus atau beberapa kasus atau satu kasus (Adlini et al., 2022). Untuk mendalami aspek – aspek yang kompleks dan kontekstual dari penerapan pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah, dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mengkarakterisasi, mengklarifikasi, dan memberikan jawaban atas peristiwa dan fenomena yang terjadi saat ini dikenal sebagai penelitian deskriptif. Berikut ini adalah contoh pola penelitian deskriptif: pengembangan, korelasi, kausal-komparatif, survei, dan studi kasus (Arsyam, 2021). Pendekatan ini dipilih oleh peneliti karena ingin mengkaji secara rinci bagaimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi.

### **C. Setting Penelitian**

Dengan jangka waktu penelitian kurang lebih dua bulan sejak proposal penelitian disetujui, penelitian ini menggunakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai studi kasus. Kantor tersebut beralamat di Jalan Veteran III No.11, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Peneliti memilih Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM sebagai objek penelitian karena Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu organisasi pemerintah yang bertugas mengawasi uang dan aset negara. Karena Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan organisasi pemerintah, maka harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Selain itu, sejak tahun 2009, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima opini WTP karena merupakan salah satu instansi pemerintah dengan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Hasil evaluasi tahunan LKPP oleh BPK memperjelas hal ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Karena merupakan komponen penting, laporan keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga akan berdampak pada laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah kasubbag perbendaharaan, bagian penyusun pengelola keuangan serta bagian akuntansi dan pelaporan Ditjenpas Kemenkumham. Peneliti melakukan wawancara dengan satu narasumber dari masing-masing subbagian untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan SPI, SAP dan penggunaan SAKTI. Pemilihan narasumber dari ketiga subbagian ini dimaksudkan untuk memberikan sudut pandang dari seluruh lini proses pengelolaan keuangan dalam satu lingkup organisasi yang sama.

#### **E. Sumber Data**

Peneliti akan mengambil data dari sumber primer dan sumber sekunder. Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya oleh peneliti dikenal sebagai data primer. Data primer terkadang disebut sebagai data asli atau data baru dan terkini. Data primer harus dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode untuk mengumpulkan data primer (Savira Agustina, 2021). Melalui wawancara dengan kasubbag perbendaharaan, staff pengelola keuangan dan staff akuntansi dan pelaporan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, peneliti mengumpulkan sumber data primer yang dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan pengendalian internal di Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham. Di sisi lain, data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari mengutip atau merujuk pada temuan data primer. Data

sekunder biasanya tidak mengungkapkan temuan baru; sebaliknya, data sekunder berisi gagasan yang telah ditemukan (Panudju et al., 2024). Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, laporan hasil pemeriksaan LKPP BPK, gambaran umum sejarah organisasi, struktur organisasi, dan buku-buku serta artikel mengenai dampak penerapan pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah, dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi terhadap kualitas laporan keuangan merupakan contoh data sekunder yang peneliti gunakan.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **a) Teknik Wawancara**

Teknik wawancara melibatkan peneliti dan informan yang berinteraksi langsung untuk menggali informasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi telah memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung maupun melalui telepon, Zoom, WhatsApp, dan platform lainnya. Untuk menggali informasi yang berbeda tentang subjek masalah penelitian, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur (Waruwu et al., 2023). Peneliti akan melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi terkait penggunaan pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dalam suatu laporan keuangan yang berkualitas tinggi sebagai upaya untuk mendapatkan opini WTP. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi wawancara terstruktur. Sebagai alat penelitian untuk wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan dan menyusun pertanyaan tertulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah direncanakan dan terstruktur. Narasumber yang diwawancarai adalah 1

orang Kasubbag Perbendaharaan, 1 orang staff pengelolaan keuangan dan 1 orang staff akuntansi dan pelaporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b) Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, prosedur observasi dan wawancara merupakan pelengkap dari strategi pengumpulan data yang mencakup dokumentasi. Studi dokumen adalah proses pengumpulan data kualitatif yang melibatkan pengumpulan banyak informasi dari dokumen. Surat-surat, buku harian, arsip foto, notulen rapat, buku catatan, dan sebagainya terdiri dari sebagian besar data Savira Agustina, (2021). Buku Metodologi Penelitian oleh Panudju et al., (2024), buku Berbagai Teori & Jenis Penelitian Kualitatif oleh (Felisianus Efrem Jelahun, 2022), dan beberapa artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian merupakan beberapa sumber dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini.

**G. Teknik Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik validitas internal yang digunakan untuk validitas data. Teknik analisis data yang disebut triangulasi mengintegrasikan data dari beberapa sumber. Menurut informasi yang tersedia secara online dari Institute of Golbal Tech, triangulasi berupaya memvalidasi data terkini dengan cepat untuk memperkuat interpretasi dan meningkatkan kebijakan dan inisiatif berdasarkan bukti yang mudah diakses. Temuan-temuan dapat menunjukkan bukti cross-sectionalization dengan mengevaluasi informasi dengan mengumpulkan data di beberapa populasi, kelompok, dan metodologi.

Hal ini mengurangi pengaruh variasi potensial yang mungkin muncul dalam satu studi (Susanto & Jailani, 2023).

Untuk meningkatkan reliabilitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang melibatkan konfirmasi temuan studi dari beberapa sumber atau informan. Informasi dari wawancara langsung dengan pihak Direktorat Jenderal Pemasaryakatan-khususnya Kasubbag Perbendaharaan, staf bagian pengelola keuangan, dan staf bagian akuntansi dan pelaporan-akan dibandingkan dalam penelitian ini.

#### **H. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis Miles & Huberman diterapkan. Analisis ini melibatkan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

##### **1) Reduksi Data**

Proses reduksi data yang rumit membutuhkan kecerdasan serta tingkat kedalaman dan keluasan wawasan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada sejumlah besar data yang dikumpulkan di lapangan, yang memerlukan pencatatan yang teliti dan terperinci yang diikuti dengan analisis reduksi data. Untuk mereduksi data, seseorang harus meringkas, memilih informasi yang paling penting, memusatkan perhatian, dan mencari tren dan tema (Safarudin et al., 2023).

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting dari data yang terkumpul, baik

dari data melalui laporan keuangan Direktorat jenderal pemsayarakatan dan hasil reuiu LKPP BPK maupun dari data wawancara langsung dengan pihak pimpinan, bagian penyusun laporan keuangan serta bagian pengendalian internal atas pelaporan keuangan Ditjenpas Kemenkumham.

## 2) Penyajian Data

Penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Safarudin et al., 2023).

## 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan awal sifatnya masih sementara dan akan mengalami perubahan bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat (Safarudin et al., 2023). Ini adalah tahap terakhir dari proses penelitian, yang mencakup pemahaman tentang arah, signifikansi, atau sumber penyelidikan. Dampak dari temuan penelitian kemudian disajikan dalam bentuk cerita ringkas.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

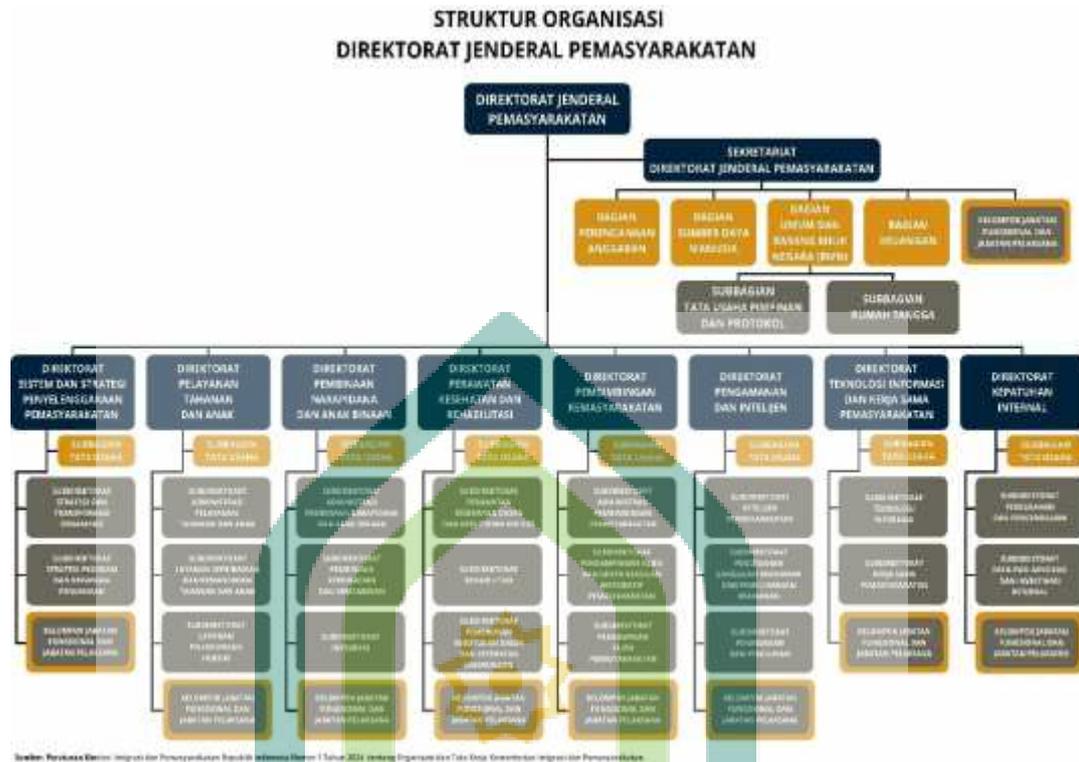
#### A. Gambaran Umum Instansi

##### 1. Profil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham

Pengorganisasian pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, salah satu komponen pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penanggung jawab organisasi ini adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas, n.d.).

Perluasan tugas dan kewajiban dalam memperlakukan tersangka, terdakwa, dan terpidana-yaitu memperlakukan mereka di luar sistem hukum hingga pemberian hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap-telah diakomodir dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Agar masyarakat dapat menerima narapidana kembali dan memungkinkan mereka untuk hidup secara wajar sebagai warga negara yang berkualitas, taat hukum, dan bertanggung jawab yang secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana, Sistem Pemasyarakatan memastikan bahwa hak-hak narapidana dan anak-anak dilindungi. Sistem Pemasyarakatan juga meningkatkan kemandirian dan kepribadian narapidana untuk membantu mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (Ditjenpas, n.d.).

## 2. Struktur Organisasi



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi**

## 3. Sasaran Program

### 1) *Stakeholders Perspective* (Perspektif Pemangku Kepentingan)

- a. Terwujudnya pengembangan administrasi pemsyarakatan yang dapat memacu inovasi dan kreativitas dalam perekonomian negara.
- b. Terwujudnya kemampuan administrasi pemsyarakatan untuk mempromosikan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan, barang milik negara, barang sitaan, narapidana, anak-anak, dan klien pemsyarakatan.

### 2) *Customer Perspective* (Perspektif Penerima Layanan)

- a. Terwujudnya pencapaian manajemen pemasyarakatan yang berkualitas tinggi.
- b. Terwujudnya pembentukan fasilitas pemasyarakatan yang aman dan terorganisir dengan baik.

3) *Internal Process Perspective* (Perspektif Proses Bisnis Internal)

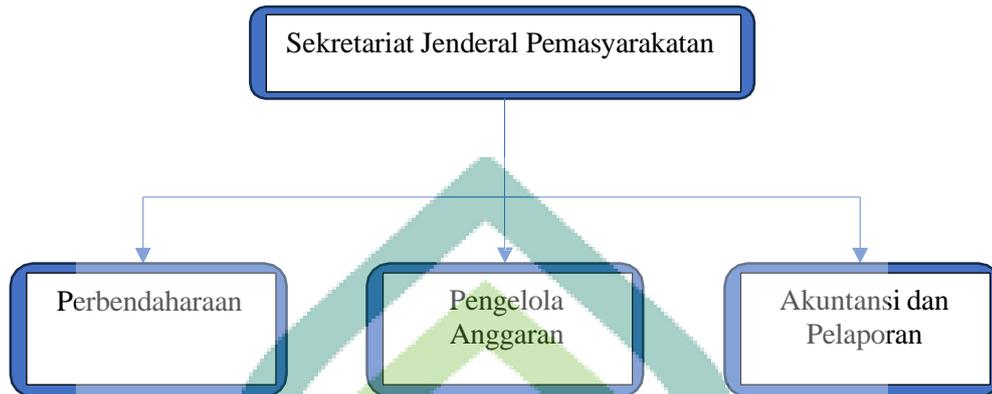
- a. Tersedianya Kebijakan yang efektif untuk pengembangan pemasyarakatan tersedia.
- b. Meningkatnya standar manajemen pemasyarakatan dalam rangka membantu penegakan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia.
- c. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pemasyarakatan secara partisipatif.

4) *Learning & Growth Perspective* (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)

- a. Terwujudnya SDM pemasyarakatan yang cakap, terhormat, dan profesional.
- b. Tersedianya layanan dan sistem informasi berbasis TI yang dapat diandalkan dan terintegrasi.
- c. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan layanan pemasyarakatan.
- d. Terwujudnya pembentukan birokrasi pemasyarakatan yang unggul dan berorientasi pada pelayanan.

Penelitian ini difokuskan pada Bagian Keuangan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan yang berada di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berikut struktur organisasi bagian keuangan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:



**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Keuangan**

1. Bagian Perbendaharaan

Bertanggung jawab atas proses pembayaran, penatausahaan kas dan pelaksanaan pengeluaran negara. Jumlah staff pada bagian ini sebanyak 17 orang.

2. Bagian Pengelolaan Anggaran

Bertugas menyusun, mengelola dan memantau pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jumlah staff pada bagian ini sebanyak 9 orang.

3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Melakukan penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sesuai SAP. Jumlah staff pada bagian ini sebanyak 11 orang.

Masing-masing bagian memiliki penanggung jawab yang mengoordinasikan pekerjaan dan pelaksanaan sistem keuangan, termasuk implementasi SPI, SAP dan penggunaan aplikasi SAKTI.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal**

Pada tahun 2022, tim Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan baru dibentuk. Pada tahun ini, transfer masuk dan keluar, serta akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, tunduk pada pengendalian internal atas laporan keuangan. Tujuan dari PIPK adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan instansi pemerintah akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yang dimaksudkan untuk mencegah laporan keuangan yang salah saji. PIPK juga memberikan penekanan agar ekosistem keuangan berjalan normal, tidak terjadi waktu kedaruratan, mepet, atau terpaksa (Humas Kemenkumham Jakarta, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan 3 narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan, ditemukan beberapa poin penting terkait sistem pengendalian internal:

Tabel 4. 1 Hasil wawancara sistem pengendalian internal

Aspek	Narasumber 1 (Ibu Ika Rah Utami : Kasubbag Perbndaharaan)	Narasumber 2 (Bapak Anggia Siahaan: Staff Akuntansi dan Pelaporan)	Narasumber 3 (Ibu Danik Purbaya : Staff Pengelola Keuangan)
Penerapan SPI di Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Untuk pengendalian internal di Ditjenpas sudah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan dilakukan dari awal perencanaan hingga pelaporan. Jadi pengawasan tidak hanya dilakukan di awal saja. Untuk memastikan tidak ada kesalahan dan laporan keuangan yang kami hasilkan mengikuti prosedur yang benar, pengawasan tetap dilakukan hingga akhir.	Di Direktorat Jenderal Pemasarakatan ada tim independen yang melakukan pengendalian internal dimana tim ini berasal dari luar yang berhubungan dengan laporan keuangan. Mereka akan melakukan pengecekan. Tetapi tidak semua secara laporan keuangan. Hanya dipilih beberapa akun – akun krusial. Misalnya perjalan dinas atau transfer.	Mengendalikan laporan keuangan secara internal mulai tahun 2022. Transfer masuk, transfer keluar, dan akun Pengeluaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semuanya tunduk pada pengendalian internal atas laporan keuangan tahun ini.
Mekanisme Kontrol dan Pemantauan	Seperti yang sudah saya katakan tadi kalau pengendalian internal ini dilakukan dari awal sampai akhir. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau yang kita sebut dengan PIPK. PIPK ini bertugas untuk mengawasi dan memantau	Pengendalian internal diterapkan di seluruh proses penganggaran dan pelaporan. Kepatuhan laporan keuangan terhadap SAP yang diimplementasikan dipantau dan dijamin oleh pengendalian internal ini.	Mekanisme kontrol yang kami lakukan diantaranya: Lingkungan pengendalian : Orang yang diberikan tugas untuk menyusun laporan keuangan adalah orang yang paham betul terhadap laporan keuangan. Penilaian risiko : Dalam

	pelaksanaan anggaran dan penggunaan sumber daya secara berkala untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		melakukan penilaian risiko, kami melakukan analisis terhadap akun-akun yang sering terdapat temuan pemeriksaan atau ada potensi temuan. Aktivitas pengendalian. Informasi dan komunikasi. Pemantauan : Pemantauan internal atas pengendalian internal dalam laporan keuangan dilakukan dengan evaluasi
Efektivitas SPI	Sampai saat ini pengendalian internal pada Ditjenpas dilakukan sudah cukup efektif.	Pengendalian internal yang dilakukan di Ditjenpas sendiri sudah cukup baik.	Sejauh ini pengendalian internal yang dilakukan sudah efektif.
Kendala SPI	Kurangnya sosialisasi kebijakan baru kepada seluruh pegawai.	Sering kali tidak ada tindak lanjut yang cukup setelah pelatihan pengendalian intern kepada pegawai untuk menjamin bahwa pengetahuan yang diperoleh digunakan dalam praktik sehari-hari. Pengendalian internal mungkin tidak akan terpengaruh secara signifikan oleh pelatihan jika tidak ada tindak lanjut.	Belum adanya pelatihan keseluruhan dan komprehensif terhadap seluruh pegawai yang terlibat dalam proses laporan keuangan

<p>Pengaruh SPI dalam WTP</p>	<p>Pengendalian intern sangat penting dilakukan karena penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) difasilitasi oleh pengendalian internal yang efisien. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Kesalahan dalam pelaporan dan pencatatan keuangan dapat dikurangi dengan bantuan pengendalian internal yang kuat. Pencapaian opini WTP juga dapat didukung dengan mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakwajaran dalam laporan keuangan melalui penerapan prosedur dan pengendalian yang jelas.</p>	<p>Pengendalian intern sangat penting dalam memperoleh opini WTP. Karena pengendalian internal sendiri tidak terlepas dari SAP. Fungsi dari pengendalian internal sendiri memastikan bahwa SAP yang dikerjakan dalam instansi adalah PSAK.</p>	<p>Pengendalian internal adalah salah komponen yang penting untuk mendapat opini WTP atas laporan keuangan. Karena pengendalian internal adalah level paling awal untuk memitigasi resiko dan membuat langkah-langkah yang untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko.</p>
-------------------------------	--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 narasumber, dapat diketahui bahwa tim PIPK dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai upaya menjalankan sistem pengendalian internal sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. bahwa pengendalian internal sudah diterapkan di Direkotrat Jenderal Tim ini melakukan pengendalian internal mulai perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan. Jadi pengawasan tidak hanya dilakukan di awal saja. Sampai akhir pun pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada kesalahan. Pengendalian internal atas laporan keuangan dilakukan terhadap akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, transfer masuk, dan transfer keluar. Sejauh ini penerapan pengendalian internal di Direktorat Jnenderal Pemasyaakatan sudah cukup baik. Namun belum sepenuhnya efektif karena masih ada kendala dalam pelatihan secara keseluruhan dan tidak ada tindak lanjut yang cukup setelah pelatihan pengendalian intern kepada pegawai untuk menjamin bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan dalam praktik sehari-hari. Ketiga narasumber setuju bahwa pengendalian internal adalah salah satu kompenen yang penting untuk mendapat opini WTP atas laporan keuangan. Karena pengendalian internal adalah level paling awal untuk memitigasi resiko dan membuat langkah-langkah untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi, penyuluhan regulasi keuangan dan pelatihan berkala bagi staf perlu dilakukan. Agar pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan diterapkan dengan efektif secara menyeluruh.

Dalam kerangka teori *stewardship*, hal ini menunjukkan bahwa tindakan

karyawan sebagai *steward* telah menunjukkan dedikasi yang tulus terhadap tujuan organisasi, tetapi sejauh mana struktur organisasi memfasilitasi tugas mereka mempengaruhi seberapa efektif tindakan mereka. Menurut teori *stewardship*, para *steward* akan melakukan yang terbaik ketika ada ruang akuntabilitas yang jelas, sistem pendukung, dan kepercayaan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2022 (terlampir). Laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik dan efektif, serta mendorong pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan terbuka. Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi indikatornya. Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan pengakuan, pencatatan, dan pelaporan keuangan telah dilakukan secara konsisten dan metodis karena tidak ada perbedaan atau pertentangan yang mencolok di antara ketiganya. Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga dibantu oleh pengendalian internal yang kuat ini, yang juga mencakup pelaporan yang akurat, pelaksanaan kebijakan keuangan, dan pengawasan aliran anggaran.

Temuan ini selaras dengan teori Standar Pengendalian Internal yang dikemukakan dalam PP No. 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Internal mencakup lima komponen, yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Penerapan SPI di Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menunjukkan keberadaan komponen-komponen ini. Misalnya, lingkungan pengendalian tercermin dari

struktur pengawasan dan adanya tim PIPK, penilaian resiko dilakukan melalui monitoring dan analisis berkala, kegiatan pengendalian diwujudkan dalam SOP dan pengawasan dokumen, serta pemantauan yang dilakukan secara periodik oleh pejabat keuangan. Dengan demikian, teori penelitian ini menunjukkan bahwa SPI di Direktorat Jenderal Pemasaryakatan telah diterapkan sesuai dengan teori SPI, baik secara struktural maupun prosedural, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman teknis di beberapa lini pelaksana.

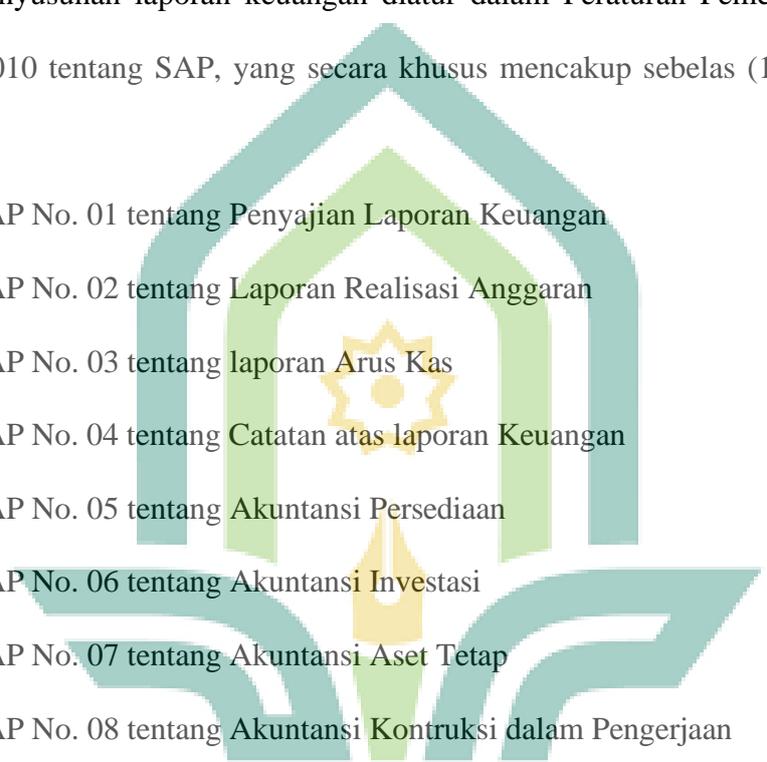
## 2. Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan SAP berbasis akrual di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan mencerminkan kondisi keuangan yang lebih nyata, termasuk pencatatan kewajiban jangka panjang dan aset tetap. Hal ini memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kesehatan fiskal negara dan memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam pengelolaan keuangan (Benny Eko Supriyanto, 2024).

Dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, Direktorat Jenderal Pemasaryakatan menggunakan metode akrual. Metode akrual adalah teknik akuntansi yang mengakui konsekuensi dari peristiwa dan transaksi pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan kejadian berikutnya. Namun demikian, basis kas penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran harus dilakukan secara tunai. Metode akuntansi yang dikenal dengan basis kas mengakui pengaruh transaksi atau

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, maka hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2022).

Penyusunan laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang SAP, yang secara khusus mencakup sebelas (11) pernyataan standar:

- 
- a) PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
  - b) PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
  - c) PSAP No. 03 tentang laporan Arus Kas
  - d) PSAP No. 04 tentang Catatan atas laporan Keuangan
  - e) PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan
  - f) PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi
  - g) PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
  - h) PSAP No. 08 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan
  - i) PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban
  - j) PSAP No. 10 tentang Koreksi kesalahan
  - k) PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan onsolidasi (Prayogo et al., 2023)

Berikut ini adalah beberapa keuntungan menggunakan akuntansi basis akrual saat menyajikan laporan keuangan:

- 1) Memberikan informasi tentang bagaimana pemerintah mencapai kebutuhan pendanaan dan membiayai operasinya

- 2) Menyajikan informasi yang akurat dan nyata mengenai tanggung jawab dan hak-hak lembaga terkait
- 3) Membantu mengevaluasi efektivitas, biaya layanan, dan pencapaian tujuan pemerintah
- 4) Menunjukkan perubahan situasi dan status keuangan pemerintah (Lina Rosana, 2023).



Berdasarkan wawancara dengan 3 narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan, ditemukan beberapa poin penting terkait standar akuntansi pemerintahan:

**Tabel 4. 2 Hasil wawancara standar akuntansi pemerintahan**

<b>Aspek</b>	<b>Narasumber 1 (Ibu Ika Rah Utami : Kasubbag Perbndaharaan)</b>	<b>Narasumber 2 (Bapak Anggia Siahaan: Staff Akuntansi dan Pelaporan)</b>	<b>Narasumber 3 (Ibu Danik Purbaya : Staff Pengelola Keuangan)</b>
Pemahana terhadap SAP	Pegawai yang menyusun laporan keuangan sudah pasti memahami apa itu SAP karena untuk menyusun laporan keuangan SAP itu sangat penting dan sangat diperlukan.	Pegawai di tingkat pusat sudah memahami SAP dengan baik.	Secara garis besar, pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan sudah memahami SAP.
Kesesuiain terhadap SAP	Kalau dilihat dari hasil audit BPK yang dimana kami mendapat opini WTP, harusnya semuanya sudah sesuai dengan SAP.	Secara standar sudah sesuai. Sekarang ada yang namanya PIPK, Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan. Jadi itu yang cukup sangat membantu. Runtutan transaksi keluar itu dikumpulkan dan diverivikasi oleh pejabat – pejabat yang memiliki kepentingan. Jadi sebenarnya standar akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK.	Laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan SAP.

<p>Kendala dalam penerapan SAP</p>	<p>Pemahaman ditingkat staf masih perlu ditingkatkan.</p>	<p>Ada beberapa pegawai yang belum begitu memahami penerapan SAP. Terutama mereka yang memiliki latar belakang di luar bidang akuntansi. Kesalahan dalam penerapan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diakui dapat timbul dari hal ini.</p>	<p>Masih ada yang belum memahami basis akrual khususnya beban yang masih harus dibayar dan pendapatan sewa diterima di muka sehingga sebagai tim eselon 1 kami harus optimal melakukan monitoring dan memberikan pemahaman kepada operator satker</p>
<p>Pengaruh SAP dalam WTP</p>	<p>SAP penting. SAP itu kan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini penting, sangat penting. Karena SAP ini diklasifikasikan akun – akunya.</p>	<p>SAP penting. Tetapi SAP hanya membantu WTP tapi BPK sebagai auditor juga mempunyai standar mereka sendiri.</p>	<p>Iya. Dalam rangka memperoleh opini WTP, SAP memiliki peran yang signifikan dan kuat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus dibuat dan disajikan sesuai dengan SAP baik dari segi bentuk maupun isinya.</p>

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 narasumber, bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Seperti pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2022 (dapat dilihat pada lampiran 7). Dasar hukum yang menjadi acuan, termasuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, telah dijelaskan secara menyeluruh dalam laporan keuangan. Selain itu, seluruh akun dalam laporan ini telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sehingga menjamin bahwa laporan keuangan telah memenuhi persyaratan keterbukaan, akuntabilitas, dan ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Tetapi, dibalik kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, masih terdapat kendala dalam penerapan SAP. Kendala ini, yaitu Ada beberapa pegawai yang belum begitu memahami penerapan SAP. Terutama mereka yang memiliki latar belakang di luar bidang akuntansi. Kesalahan dalam penerapan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diakui dapat timbul dari hal ini. Masih ada yang belum memahami basis akrual khususnya beban yang masih harus dibayar dan pendapatan sewa diterima di muka sehingga sebagai tim eselon 1 harus optimal melakukan monitoring dan memberikan pemahaman kepada operator satker.

Studi kualitatif terhadap penelitian ini mengungkapkan adanya kelemahan dalam pengembangan kompetensi teknis. Kesenjangan ini memprihatinkan dari perspektif teori *stewardship* karena para *steward* idealnya dapat memahami pentingnya pelaporan keuangan sebagai sarana akuntabilitas publik di samping

melakukan tugas-tugas administratif. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan SAP yang sukses tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memiliki kapasitas individu untuk mengenali kebutuhan akan integritas dan transparansi dalam pelaporan.

SAP ini sangat berpengaruh dalam memperoleh opini WTP. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, bentuk dan substansi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Oleh karena itu, agar penerapan SAP dilakukan secara maksimal, perlu dilakukan peningkatan pemahaman para staff mengenai SAP berbasis akrual untuk mengatasi kendala yang terjadi. Karena jika pegawai tidak memahami secara mendalam mengenai SAP, resiko ketidaksiain laporan keuangan meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi dalam memperoleh opini WTP. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan lebih lanjut mengenai SAP.

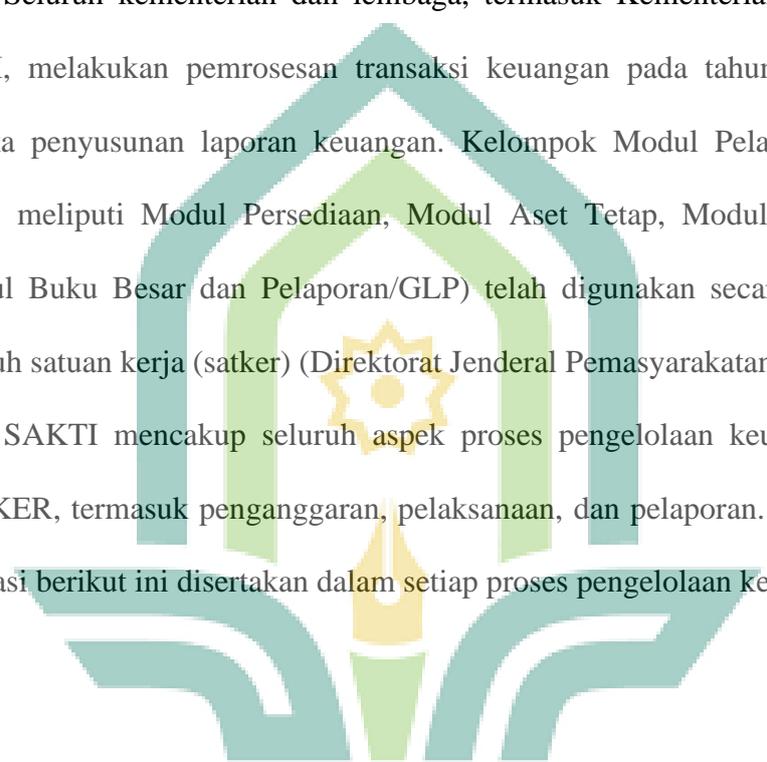
Jika dibandingkan dengan teori SAP dalam landasan teori, SAP berbasis akrual memungkinkan pengakuan pendapatan, beban, aset dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi ekonomi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut, dengan menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan akrual. Kendala teknis seperti perbedaan pemahaman antar pegawai masih ditemukan, namun secara keseluruhan, penerapan SAP telah mengacu pada prinsip teori dan regulasi yang berlaku.

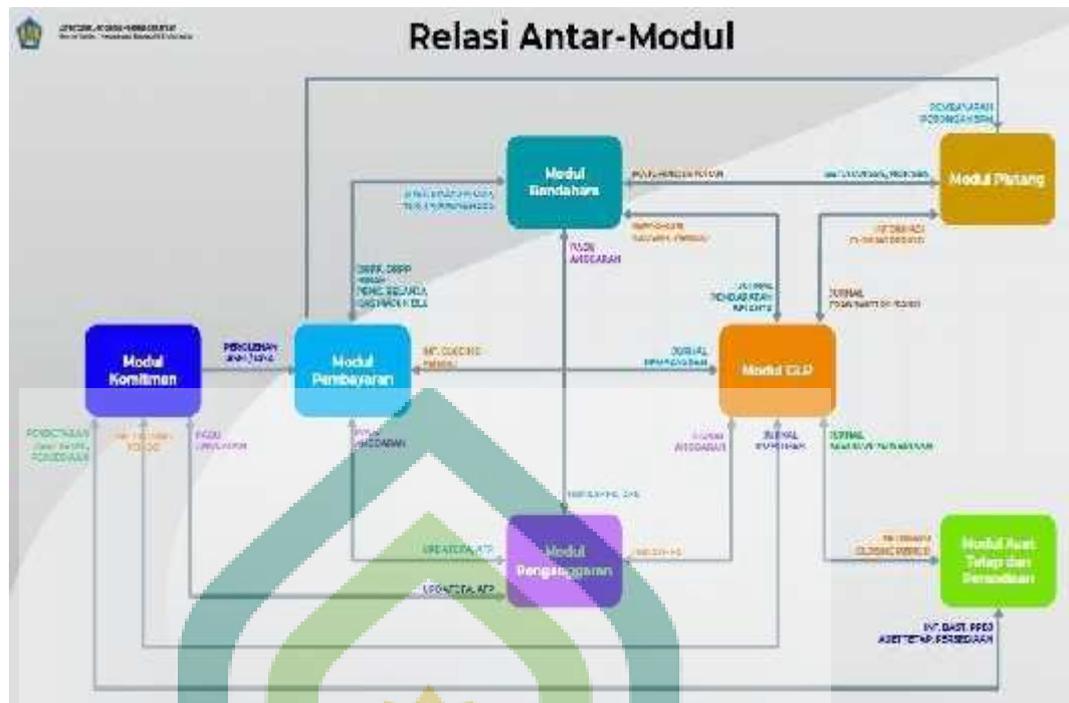
### 3. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

Penerapan modul SAKTI yang lebih komprehensif telah mengeliminasi penggunaan Persediaan, Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, melakukan pemrosesan transaksi keuangan pada tahun 2022 dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Kelompok Modul Pelaporan SAKTI (yang meliputi Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, dan Modul Buku Besar dan Pelaporan/GLP) telah digunakan secara penuh oleh seluruh satuan kerja (satker) (Direktorat Jenderal Pemasaran, 2022).

SAKTI mencakup seluruh aspek proses pengelolaan keuangan negara SATKER, termasuk penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Modul-modul aplikasi berikut ini disertakan dalam setiap proses pengelolaan keuangan:





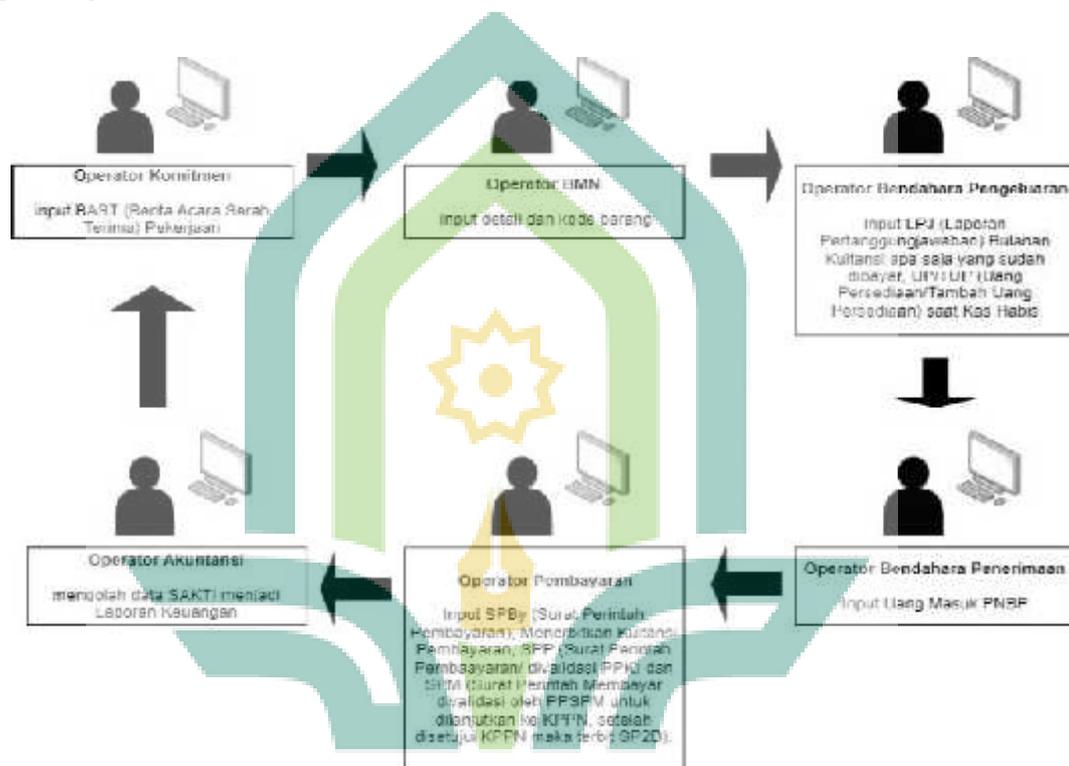
**Gambar 4.3 Relasi antar Modul**

1. Modul Penganggaran, adalah modul yang melakukan proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk di dalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun anggaran.
2. Modul Komitmen, adalah modul yang menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan Data Kontrak, Pencatatan Pemasok, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, dan Verifikasi Pencapaian Output.
3. Modul Pembayaran adalah modul yang menangani pemrosesan Rencana Kas (Renkas), Surat Perintah Membayar (SPBy), Surat Perintah Pencairan Dana (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum dikirim ke KPPN untuk melaksanakan pembayaran

APBN.

4. Modul Bendahara, sebagai komponen dari Modul Pelaksanaan Anggaran, Modul Bendahara berfokus pada proses pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini mencakup peran Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
5. Modul Persediaan adalah modul SAKTI yang berfokus pada pengelolaan persediaan di tingkat unit kerja (UAKPB) dan unit kerja pembantu (UAPKPB).
6. Modul Aset Tetap, modul aplikasi SAKTI digunakan untuk mengelola transaksi keuangan yang melibatkan aset tetap. Hal ini termasuk mendokumentasikan dan mencatat penambahan, modifikasi, dan penghapusan barang milik Negara, proyek konstruksi, dan perhitungan penyusutan.
7. Modul Pelaporan, modul SAKTI yang dikenal sebagai modul pelaporan mencakup semua prosedur yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan.
8. Modul Administrasi, adalah suatu modul yang dapat mengelola akun pengguna, hak akses, pengaturan sistem, dan mengubah referensi.
9. Modul Piutang, adalah komponen SAKTI yang mengelola transaksi piutang Satker pengguna SAKTI (KPPN Kotabumi, 2021).

Operator, validator, dan approver merupakan pengguna operasional dari modul-modul SAKTI. Operator adalah anggota staf atau agen yang ditunjuk untuk mengawasi tugas input data dalam modul SAKTI. Validator melakukan penelitian dan pengujian yang berkaitan dengan entri data operator. Ketika operator atau validator melakukan penginputan data, approver bertugas menangani proses persetujuan.



**Gambar 4. 4 Pengguna Operasional SAKTI**

SAKTI juga memiliki beberapa keunggulan yang membuat SAKTI lebih unggul dari aplikasi satker sebelumnya, sebagai berikut:

1. *Single database* yaitu penyimpanan data transaksi yang terpusat tercermin dalam satu database. Seluruh data transaksi keuangan satuan kerja (Satker) disimpan dalam satu perangkat penyimpanan data. Ketika hanya ada satu database, satker tidak perlu menginstal, mengalokasikan memori, dan

bergantung pada perangkat yang menjalankan database untuk berfungsi.

2. *Single Entry Point* adalah di mana semua pengguna dapat menggunakan proses memasukkan data, yang hanya membutuhkan satu kali entri. Pengguna dapat memasukkan data ke dalam modul pelaporan melalui modul pembayaran. Setiap pengguna dan modul menerima output dalam bentuk data real-time dari satu entri.
3. *Single Monitoring* memungkinkan semua unit untuk melacak data transaksi keuangan terkini, mulai dari tingkat unit kerja, kantor wilayah, hingga tingkat eselon I. Setiap unit bisa mendapatkan ringkasan informasi dari unit-unit di bawahnya.
4. *Interface* dengan SPAN atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, sebagai program pendukung SAKTI yang terotomatisasi, untuk seluruh fungsi anggaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. *One Time Password (OTP)* yang memastikan otentikasi hak akses tervalidasi dalam setiap transaksi SAKTI, meningkatkan tingkat keamanan sistem (Muharman, 2022).

Berdasarkan wawancara dengan 3 narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, ditemukan beberapa poin penting terkait Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat nstansi (SAKTI):

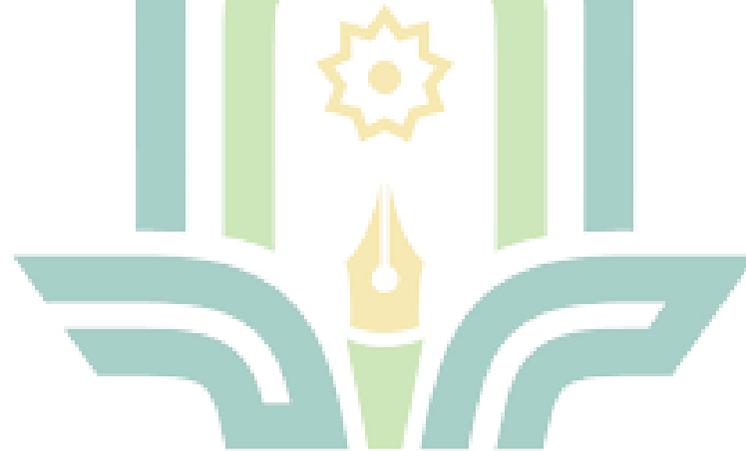
Tabel 4. 3 Hasil wawancara SAKTI

Aspek	Narasumber 1 (Ibu Ika Rah Utami : Kasubbag Perbndaharaan)	Narasumber 2 (Bapak Anggia Siahaan: Staff Akuntansi dan Pelaporan)	Narasumber 3 (Ibu Danik Purbaya : Staff Pengelola Keuangan)
Perbedaan SAKTI dan aplikasi sebelumnya	Ada bedanya. Dulu kalau SAS itu terpisah – pisah. Ada SAS sendiri, SILABI sendiri dan SIMAK BMN sendiri. Kalau sekarang jadi satu di SAKTI. Mulai dari perencanaan sampai kinerja itu semua ada di SAKTI. Menurut saya lebih mudah menggunakan SAKTI karena modul-modul yang kami butuhkan terintegrasi di dalam aplikasi SAKTI. Setiap input terstruktur dan pelacakan menjadi sederhana. Aplikasi ini memungkinkan penyesuaian yang dapat dilakukan jika ada akun atau nominal yang salah diisi. Aplikasi ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang lebih manual dan terpisah.	SAKTI dengan SAIBA berbeda. Karena pada masa sebelumnya itu sistem keuangan pemerintah belum berbasis akrual masih berbasis kas. Jadi semua yang tercatat adalah ketika dananya sudah keluar. Kalau sekarang berbasis akrual, walaupun uangnya belum keluar, aset yang dibeli sudah harus dicatat. SAIBA itu tidak berbasis web, tetapi SAIBA itu aplikasi jadi penggunaannya bisa offline. Sedangkan SAKTI berbasis web karena agar satu pintu saja. Jadi semua linear, tidak lagi sistem pencatatan manual. Masing – masing bagian dia akan melakukan pekerjaannya, nanti ujungnya adalah laporan	SAKTI atau Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi dan SAIBA atau Sistem Akuntansi Berbasis Akrual memiliki perbedaan diantaranya: SAKTI adalah sistem informasi yang berbasis web atau online dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja, sedangkan SAIBA adalah sistem informasi berbasis divais sehingga hanya bisa diakses di komputer yang terinstal; SAKTI adalah sistem informasi keuangan yang terintegrasi mulai dari penggaaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pelaporan. Sedangkan SAIBA adalah sistem informasi yang hanya digunakan untuk proses pelaporan;

		<p>keuangan. Lebih mudah menggunakan SAKTI. Karena SAIBA selama ini rekonsiliasinya manual. Kita membandingkan data secara manual antara laporan BMN sama laporan keuangan kita bikin secara manual. Misal belanja modal, kita harus bandingkan dulu BMN catat berapa rupiah yang jadi aset pada tahun berjalan, berapa rupiah yang kita keluarkan dalam bentuk kas. Kalau sekarang karena web basis, jadi kita tidak perlu rekonsiliasi secara manual. Jadi semua langsung ke data dalam laporan SAKTI apakah pencatatan asetnya sama dengan dana yang dikeluarkan. Jadi lebih mumpuni memakai SAKTI.</p>	<p>Lebih mudah mana menggunakan SAKTI atau SAIBA? Sebenarnya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, tetapi secara garis besar lebih mudah menggunakan SAKTI dan data yang disajikan juga lebih real time dibanding SAIBA.</p>
<p>Kendala penggunaan SAKTI</p>	<p>SAKTI itu memerlukan koneksi internet yang baik. Jika internet yang digunakan kurang baik, maka dapat menghambat proses pe nginputan di SAKTI. Selain itu, juga sering terjadi loading yang sangat lama saat mengakses</p>	<p>Kendalanya sebenarnya ada beberapa hal SAKTI belum bisa menampung. Misalnya kita harus masih melakukan jurnal manual terhadap hutang. Karena dari kementerian sendiri SAKTI masih dalam proses pengembangan.</p>	<p>Kendala yang dihadapi ketika menggunakan SAKTI diantaranya adalah: Harus terus terkoneksi internet untuk dapat bisa mengakses sistem, jadi ketika kita berada di tempat yang susah jangkauan internetnya akan</p>

	menu tertentu dalam SAKTI.		menjadi sedikit masalah; SAKTI kadang suka sering dilakukan maintenance yang kadang cukup lama.
Pelatihan SAKTI	Pelatihan ada waktu awal – awal SAKTI digunakan	Pelatihan dilakukan pada saat SAKTI akan diluncurkan. Sese kali ada pelatihan kalau ada informasi tambahan dari KPPN.	Sejauh ini, para pegawai yang terlibat dalam pelaporan sudah memahami cara penggunaan SAKTI. Ada pelatihannya. Sebelum aplikasi ini digunakan, ada pelatihan. Selain itu jika ada update aplikasi dan juknis baru serta pada waktu-waktu tertentu seperti saat akan menyusun laporan keuangan terdapat sosialisasi baik melalui zoom, video di youtube maupun secara offline.
Pengaruh SAKTI dalam WTP	Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi ini menggunakan metode akuntansi akrual, yang menjamin pencatatan yang akurat atas semua transaksi dan	Menurut saya, SAKTI setengah – setengah`1 antara berpengaruh atau tidak. Karena kalau bicara WTP, muaranya ada dari siste pengendalian internal. Jadi SAKTI hanya akan mengakomodir apa yang sistem pengendalian internal lakukan. Enaknya penggunaan SAKTI hanya karena semua transaksi tercatat secara jelas sudah tidak	Penggunaan SAKTI berpengaruh terhadap opini WTP. Dengan adanya SAKTI juga sangat membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih real time dan akurat akuntabel Mungkin SAKTI berpengaruh terhadap opini WTP tetapi hanya kecil. SAKTI bukan menjadi faktor utama tetapi hanya membantu saja dalam

	meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.	bisa ada data – data yang disembunyikan. SAKTI hanya mengakomodir bahwa data tersaji secara real. Mungkin SAKTI berpengaruh terhadap opini WTP tetapi hanya kecil. SAKTI bukan menjadi faktor utama tetapi hanya membantu saja dalam memperoleh opini WTP.	memperoleh opini WTP.
--	--	--	-----------------------



Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 narasumber, bahwa Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menggunakan aplikasi SAKTI sejak 2022. Aplikasi SAKTI ini memiliki perbedaan dengan aplikasi existing sebelumnya. SAKTI adalah sistem informasi yang berbasis web atau online dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja, sedangkan aplikasi existing sebelumnya adalah sistem informasi berbasis device sehingga hanya bisa diakses di komputer yang terinstal; SAKTI adalah sistem informasi keuangan yang terintegrasi mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pelaporan. Sedangkan aplikasi existing sebelumnya adalah sistem informasi yang hanya digunakan untuk proses pelaporan. Secara garis besar lebih mudah menggunakan SAKTI dan data yang disajikan juga lebih real time dibandingkan aplikasi existing.

Seperti pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2022 (lihat lampiran 8) menunjukkan hasil bahwa tidak terjadi selisih antara SAKTI dan SPAN. Hal ini menunjukkan bahwa SAKTI juga memiliki kualitas yang sebanding dengan SPAN. Para pegawai Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang terlibat dalam pelaporan sudah memahami cara penggunaan SAKTI. Sebelum aplikasi SAKTI digunakan, dilakukan pelatihan. Selain itu, jika ada update aplikasi dan juknis baru serta pada waktu-waktu tertentu seperti saat akan menyusun laporan keuangan terdapat sosialisasi baik melalui zoom, video di youtube maupun secara offline.

Dua dari tiga narasumber setuju bahwa SAKTI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini WTP karena aplikasi ini menggunakan metode akuntansi akrual, yang menjamin pencatatan yang akurat atas semua transaksi dan

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Aplikasi SAKTI Monitoring, yang juga dikenal sebagai MonSakti, memungkinkan pemantauan dan evaluasi secara real-time atas semua transaksi di seluruh modul SAKTI, sehingga memudahkan pengumpulan data yang diperlukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Namun, ada 1 narasumber yang berpendapat bahwa pengaruh SAKTI hanya setengahnya saja, tidak terlalu berpengaruh. Karena SAKTI sendiri merupakan aplikasi pihak ketiga yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, sehingga masih ada faktor lain seperti kepatuhan internal satuan kerja yang berperan penting. Dapat disimpulkan bahwa meskipun SAKTI berpengaruh signifikan dalam mempertahankan opini WTP, tetapi SAKTI bukan satu – satunya faktor yang penting. Masih terdapat faktor – faktor lain yang juga sangat penting dalam mempertahankan opini WTP, seperti pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan.

Namun demikian, masalah-masalah seperti jaringan internet yang kecil, kerusakan sistem, dan kurangnya pelatihan tambahan masih menjadi hambatan. Dari hasil wawancara menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami semua fungsi SAKTI dan hanya menguasai beberapa modul.

Dari sudut pandang *stewardship*, hal ini menunjukkan bahwa jika organisasi juga menawarkan struktur dukungan yang memadai, teknologi seperti SAKTI akan memberdayakan *steward* secara efektif. Teknologi informasi dapat menjadi kurang strategis dalam mendorong akuntabilitas jika hanya digunakan sebagai alat administratif tanpa pelatihan yang memadai

Dalam landasan teori, SAKTI dijelaskan sebagai sistem aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menggantikan sistem manual dan sistem terdahulu. Teori ini menyebutkan bahwa penggunaan SAKTI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan penelitian, implementasi SAKTI di Direktorat Jenderal Pemasaran sudah sesuai. Kendala yang ditemukan lebih bersifat teknis, seperti beban kerja ganda dan kebutuhan pelatihan tambahan, namun secara sistem, SAKTI telah membantu meningkatkan efisiensi dan integritas data keuangan Direktorat Jenderal Pemasaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan bahwa aplikasi SAKTI telah diimplementasikan sesuai dengan teori sistem keuangan berbasis digital yang mendukung akuntabilitas instansi pemerintah.

Ketiga variabel utama (SPI, SAP, SAKTI) menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pemasaran DKI Jakarta secara sistem telah memenuhi unsur-unsur pengelolaan keuangan yang baik. Namun, pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa terdapat variasi implementasi dan pemahaman di antara pelaksana di lapangan.

Dari perspektif teori *stewardship*, *stewardship* muncul kuat dalam komitmen pegawai terhadap pelaporan keuangan. Namun, dukungan organisasi (pelatihan, sistem yang terintegrasi, supervisi aktif) belum sepenuhnya optimal.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan hanya ditentukan oleh ada tidaknya sistem, tetapi bagaimana sistem itu diinternalisasi oleh seluruh elemen organisasi.

Dengan demikian, efektivitas SPI, penerapan SAP, dan penggunaan SAKTI menjadi cerminan dari kombinasi antara sistem yang baik dan steward yang didukung dan dipercayai. Di sinilah teori stewardship memberikan panduan penting dalam memahami tantangan dan strategi mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dengan merujuk pada hasil penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dalam Mempertahankan Opini WTP : Studi Kasus pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM” dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Sistem Pengendalian Internal sangat penting dan berpengaruh dalam mempertahankan opini WTP. Sistem peendalian internal mengawasi laporan keuangan dari awal penganggaran sampai dengan pelaporan. Pengendalian internal ini memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP yang diterapkan. Sistem Pengendalian Internal dapat mecegah terjadinya kesalahan dalam pelaporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan sudah dilaksanakan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan Kemenkumham yang memperoleh opini WTP 15 kali berturut – turut. Namun, efektivitasnya masih beragam antar unit kerja, tergantung pada pemahaman dan kesadaran masing-masing pegawai terhadap pentingnya pengendalian internal.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan memuat prinsip – prinsip akuntansi yang dimana menjadi pedoman dalam menyusun sebuah laporan keuangan pemerintah. Sehingga Standar Akuntansi Pmerintahan ini

3. berpengaruh dalam mempertahankan opini WTP. Dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, risiko kesalahan dalam menyusun sebuah laporan keuangan dan dihindari. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektifnifi tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal serta tranparansi laporan keuangan. Namun, pemahaman teknis atas isi laporan seperti LO, LPE, dan LPSAL masih belum merata. Ini menunjukkan bahwa dukungan organisasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai perlu terus diperkuat.
4. Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi juga berpengaruh dalam mempertahanknan opini WTP. Meskipun Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi signifikan berpengaruh dalam mempertahankan opini WTP, masih terdapat faktor lain yang lebih penting dalam memperthankan opini WTP. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan akomodir dari pihak ketiga yaitu Kementrian Keuangan. SAKTI hanya mengakomodir bahwa data tersaji secara real. Tetapi, dengan adanya SAKTI sangat membantu dan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan SAKTI sudah terintegras dan mudah diakses. Sehingga semua transaksi tercatat dengan jelas. Namun, tantangan berupa keterbatasan pelatihan dan kendala teknis seperti jaringan internet masih menjadi hambatan di lapangan.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Beberapa batasan mungkin perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya untuk meningkatkan kualitas penelitian mereka, berdasarkan pengalaman peneliti selama proses penelitian. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan dari penelitian ini:

1. Dibandingkan dengan rencana awal peneliti, yang seharusnya memakan waktu sekitar tiga bulan, pelaksanaan penelitian ini mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan kesibukan para informan yang cukup padat, sehingga menyebabkan beberapa kendala dan penundaan dalam proses penelitian.
2. Objek penelitian ini hanya berfokus pada satu instansi saja. Temuan-temuan dari penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lainnya atau organisasi pemerintah lainnya karena penelitian ini terbatas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3. Mungkin terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini WTP yang tidak dapat diukur atau tidak tercakup dalam analisis, seperti pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja laporan keuangan, seperti perubahan peraturan pemerintah atau situasi perekonomian.

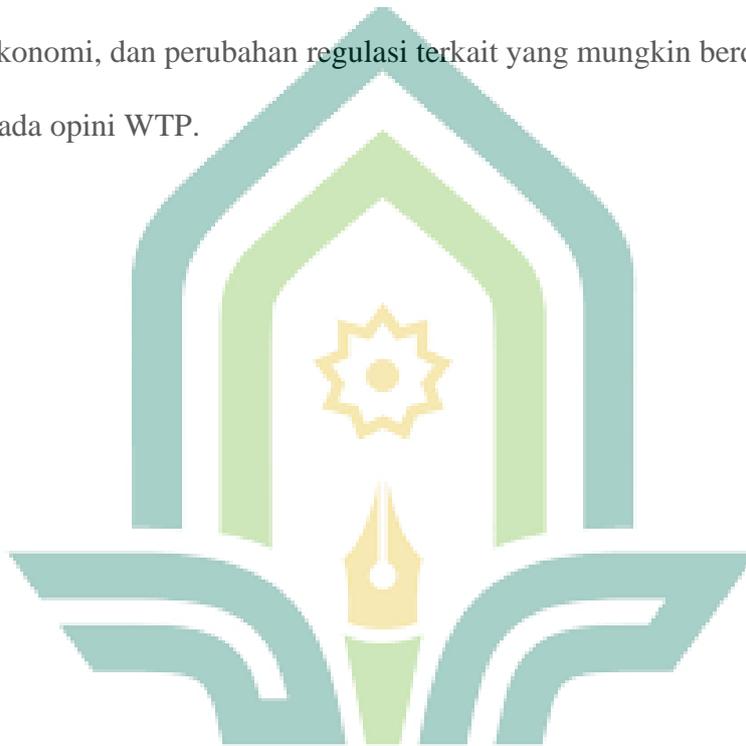
## **C. Saran Penelitian**

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya diantaranya:

1. Untuk membandingkan hasil temuan dan memberikan gambaran yang

lebih lengkap mengenai penerapan sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang sebanding di beberapa instansi pemerintahan yang berbeda.

2. Penelitian di masa depan harus mempertimbangkan variabel-variabel eksternal seperti kebijakan pemerintah terbaru, kondisi ekonomi, dan perubahan regulasi terkait yang mungkin berdampak pada opini WTP.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA*. 6(1), 974–980.
- Anita Sari, A. W. L. (2022). *ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DAN KINERJA SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN(STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA)*. 7(2), 59–66.
- Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). *Jambi Accounting Review (JAR ) PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN , KOMPETENSI SUMBER DAYA*. 1(April), 44–62.
- Arsyam, M. (2021). *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*.
- Asmawanti-S, D., & Soya, M. (2023). Analisis Bibliometrik Good Government Governance di Indonesia dari Tahun 2015-2020. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 12(1), 21–38.  
<https://doi.org/10.30591/monex.v12i1.3760>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. (2023). Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat tahun 2022. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia*, 1–185.
- Benny Eko Supriyanto. (2024). *Evaluasi Efektivitas Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Indonesia*.
- BPK. (2024). *lkpp\_2023\_1717473749.pdf*.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2022). *Direktorat jenderal pemsarakatan*

*kementerian hukum dan ham.*

Ditjenpas. (n.d.). *Profil Organisasi*. <https://www.ditjenpas.go.id/profil->

organisasi Djpb Kemenkeu. (2019). *SAKTI, Dukungan Teknologi untuk Fungsi Treasury*.

Djpb Kemenkeu. (2022). *Peluncuran SAKTI Tandai Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah*.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/siaran-pers/3842-peluncuran-sakti-tandai-integrasi-sistem-pengelolaan-keuangan-pemerintah.html>

Enita Binawati, C. T. N. (2022). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*. 112, 19–39.

Felisianus Efrem Jelahun. (2022). *Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif John. W. Creswell*.

Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah. *Owner*, 8(1), 300–313.

<https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846>

Humas Kemenkumham Jakarta. (2024). *Tertib Pelaporan Keuangan Melalui Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan*.

<https://jakarta.kemenkum.go.id/berita-utama/tertib-pelaporan-keuangan-melalui-penerapan-pengendalian-intern-atas-pelaporan-keuangan>

- Inang Sh, A. S. (2023). *Kemenkumham Raih Opini WTP 14 Kali Berturut-turut*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2023/08/04/15581361/kemenkumham-raih-opini-wtp-14-kali-berturut-turut-yasonna-jelaskan>
- Ismail, M. R. N. H., & Sasmito Jati Utama. (2022). Penerapan SAKTI dalam Sistem Informasi Akuntansi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 25(2), 102–109. <https://doi.org/10.30649/aamama.v25i2.144>
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145>
- KPPN Kotabumi. (2021). *Modul-Modul Dalam SAKTI*.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/sakti/mengenal-sakti/modul-modul-sakti-web.html>
- Lina Rosana, R. W. B. (2023). *IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN*. 3(1), 23–34.
- Maharani, Y., & Sari, R. (2021). *Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang*. 2(1), 97–103.
- Muharman, B. (2022). *SAKTI, terobosan dalam sistem pengelolaan keuangan negara*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/2979-sakti,-terobosan-dalam-sistem-pengelolaan-keuangan-negara,-aplikasi-tanpa-sekat-ruang-dan-waktu.html>
- Muldiyanto, W. B. Y. (2021). *Mengenal Secara Singkat Perjalanan Waktu Piloting SAKTI Sampai Dengan Implementasi Berdasarkan Peraturan*

*Menteri Keuangan*. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-yogyakarta/artikel/mengenal-secara-singkat-perjalanan-waktu-piloting-sakti-sampai-dengan-implementasi-berdasarkan-peraturan-menteri-keuangan-568022>

Neli Sri Mulyati, Eva Faridah, B. P. (2019). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 1(1), 60–71.

Ni Komang Ayu Mahartini, Anik Yuesti, I. M. S. (2021). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem*. 1(4), 1125–1134.

Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 10(1), 48–58.

Panudju, A. T., Bhayangkara, U., Raya, J., Purba, F., Mangkurat, U. L., Nurbaiti, S., Kesehatan, P., Semarang, K., Kalalinggi, S. Y., & Raya, U. P. (2024).

*Metodologi penelitian* (Issue February).

Permata, N. R., & Dethan, M. A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Kualitas Pelaporan Keuangan Yayasan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Maumere. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 88–95. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3862>

- Permata, R. (2021). *Implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (sakti) di kpp pratama Mojokerto*.
- Prayitno, P. B. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)*. 1–23.
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). *Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah*. 3(2), 44–58.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Rahmany, S., & Fatimah, F. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 110–123. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.223>
- Ramadhani, A. T., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. *Indonesian Journal of Research in Economy*, 1(2), 116–124. <https://etdci.org/journal/ijre/article/view/526>
- Rinna, R. (2024). *Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ( SAKTI ) Terhadap Efektivitas , Kinerja Pengguna Dan Dampak*

*Pada Kualitas Laporan Keuangan Balai Guru Penggerak Indonesia Timur.*

1.

Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Kualitatif*. 3, 9680–9694.

Siti Rahmawati, Cris Kuntadi, R. P. (2023). *IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SOSIALISASI PELAPORAN AKUNTANSI PEMERINTAH, PENYETARAAN PELAPORAN PADA KANTOR DESA KARANG SATRIA*. 3(4).

Susanti, A., Riadi, S., Sang, U., Ruwa, B., Keuangan, P., Intern, P., & Akuntansi, S. (2022). *Pembinaan Satuan Kerja Direktorat Jenderal*. 3(1).

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. 1(1), 53–61.

Tri Hadi Putra. (2020). *Pengendalian Internal*.

<https://www.ditjenpas.go.id/kadivmin-sultra-sosialisasikan-pengendalian-internal-di-rutan-unaaha>

Usman, K. (2024). *Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo*. 10(1), 84–93.

UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1). (2004). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasa-r>

modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo

Waruwu, M., Pendidikan, M. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Method )*. 7, 2896–2910.

Wiranti, W. P. (2021). *PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN , TEKNOLOGI INFORMASI*.

Yusriwati, N. S. (2022). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. INHIL)*. 11(1), 34–44.



*Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup Penulis*

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. IDENTITAS

1. Nama : Siti Nurlela
2. Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 November 2001
3. Alamat rumah : Jl. Delima III No. 197 RT10/003,  
Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan  
Duren Sawit, Jakrta Timur, Provinsi  
DKI Jakarta
4. Alamat tinggal : Jl. Delima III No. 197 RT10/003,  
Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan  
Duren Sawit, Jakrta Timur, Provinsi  
DKI Jakarta
5. Nomor handphone : 082246550951
6. Email : [sentanaela@gmail.com](mailto:sentanaela@gmail.com)
7. Nama Ayah : M. Rahmat
8. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
9. Nama Ibu : Waidah
10. Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Malaka Sari 03 Pagi
2. SMP : SMP Negeri 139 Jakarta
3. SMA : SMA Negeri 71 Jakarta

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. AMJ (Aliansi Mahasiswa Jabodetabek), Pengurus Departemen Agama, 2021
2. AMJ (Aliansi Mahasiswa Jabodetabek), Ketua Departemen Minat dan Bakat, 2022
3. FKJMU (Forum Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), Bendahara, 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nurlela  
NIM : 4320101  
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syari'ah  
E-mail address : [sentanaela@gmail.com](mailto:sentanaela@gmail.com)  
No. Hp : 082246550951

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Upaya Mempertahankan Opini WTP pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan DKI Jakarta melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2025



SITI NURLELA

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD